

KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN

2011-2014

SKRIPSI



Disusun oleh

RIZKA PERDANA PUTRA

NIM. 071112085

PROGRAM STUDI SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SEMESTER GANJIL 2015/2016

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN
2011-2014**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi S- 1

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Airlangga

Disusun oleh

RIZKA PERDANA PUTRA

NIM 071112085

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SEMESTER GANJIL 2015/2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

“Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2014”

Disusun oleh:

Rizka Perdana Putra

071112085

Disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji

Surabaya, 17 Desember 2015

Dosen Pembimbing,



Drs. Djoko Sulistyvo, MS.

NIP. 19530405 198502 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



M. Muttaqien, S.IP, MA, Ph.D

NIP. 19730130 199903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji pada hari Kamis,
31 Desember 2015, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang Cakra Buana Catur
Matra, Gedung C
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
Surabaya**

**Komisi Penguji
Ketua,**



Vinsensio Dugis, Ph.D
(NIP. 19650113 199101 1 001)

Anggota I,



I Gede Wahyu Wicaksana, Ph.D
(NIP. 19790602 200710 1 001)

Anggota II,



Citra Hennida, S.IP.,MA
(NIP. 19791025 200604 2 001)

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan skripsi berjudul:

“Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2014 ”

ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.

Surabaya 17 Desember 2015



Rizka Perdana Putra

KATA PENGANTAR

Skripsi ini awal mula dibuat pada pertengahan 2014. Ketika itu konflik Suriah yang telah berlangsung sejak 2011 tidak kunjung mendapat titik terang. Dinamika konflik terus berkembang dari perang sipil, kemudian penggunaan senjata kimia, sampai keterlibatan ISIS di dalamnya. Ketertarikan penulis pada negara Cina kemudian mengantarkan penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana peran Cina dalam konflik Suriah ini. Apa kepentingan Cina di Suriah tersebut sehingga Cina berani untuk memveto resolusi DK PBB sebagai counter terhadap Barat.

Tiga semester bukanlah waktu yang singkat untuk menyelesaikan karya berupa skripsi. Ditengah berbagai hambatan yang diperoleh penulis, sudah sepantasnya kemudian rasa syukur pertama dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayahnya yang tak terkira. Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Konflik Suriah" ini. Tidak mendapat hasil yang maksimal sesungguhnya tidak menjadi soal. Segala proses yang dialami penulis dalam menyusun skripsi ini merupakan sebuah pembelajaran bagi penulis.

Atas terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orangtua yang telah sabar mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi. Dukungan moral tiada henti selalu diberikan disaat penulis mengalami berbagai hambatan skripsi. Doa dan berbagai bentuk dorongan yang diberikan Mama khususnya senantiasa terus memberikan semangat baru bagi penulis untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi.

Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada pak Djoko Sulistyono yang telah bersedia membimbing selama tiga semester ini. Beliau yang telah bersabar menghadapi mahasiswa bimbingannya yang keras kepala ini untuk tidak merubah isi skripsi sesuai dengan keinginan penulis. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Dugis, Mas Wahyu dan Mbak Citra selaku dosen penguji skripsi. Dengan berbagai masukan dan kritik dari ketiganya, penulis dapat mengetahui secara jelas kekurangan dari skripsi ini.

Kepada *geng anak gaul*, Dini, Donal terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya atas penerimaannya terkait berbagai cerita kesulitan yang dihadapi penulis dalam mengerjakan skripsi. Akhirnya kita semua lulus rek ! Terima kasih juga kepada *geng mbolangers*, Helmy, Bayu, Bima yang terus memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis untuk tidak mau kalah dan terus berjuang menyelesaikan skripsi ini. Kepada teman sebimbangan Leli dan juga Rene kemudian Galih, Fikri, Jeki, Vijai penulis juga sampaikan terima kasih. Tidak lupa kepada teman-teman LPM Mercusuar Unair yang telah memberikan pengalaman berharga bagi penulis.

Dan, terakhir kepada Shinta Dwi Adinda. Dukungan dan kehadiranmu di setiap langkah penulis telah memberikan arti lebih. Terima Kasih.

Akhir kata semoga skripsi ini mampu memberikan pembelajaran baru bagi pembacanya.

Surabaya, 14 Januari 2016

Rizka Perdana Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Pertanyaan Penelitian.....	8
I.3 Tujuan Penelitian	8
I.4 Manfaat Penelitian	9
I.5 Kerangka Pemikiran.....	9
I.5.1 Teori Realisme Defensif.....	9
I.5.2 Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri	13
I.6 Hipotesis	15
I.7 Metodologi Penelitian.....	16
I.7.1 Operasionalisasi dan Definisi Konseptual	16
I.7.2 Tipe Penelitian	17
I.7.3 Jangkauan Penelitian	17
I.7.4 Teknik Pengumpulan Data	18
I.7.6 Teknik Analisis Data	18
I.7.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA	19
II.1 Dasar Kebijakan Luar Negeri Cina	19
II.2 Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Konflik Suriah.....	30
II.2.1 Veto Cina dalam Draf Resolusi DK PBB.....	30

II.2.2 Kebijakan Cina Mendukung Presiden Assad dan Mendukung Penyelesaian Konflik Secara Politik.....	37
BAB III KEPENTINGAN CINA DI KONFLIK SURIAH	45
III.1 Kepentingan Ekonomi Cina Di Timur Tengah	45
III.1.1 Keamanan Energi Cina di Timur Tengah	46
III.1.2 Hubungan Ekonomi Cina dengan Timur Tengah	50
III.2 Kepentingan Keamanan Cina : Menjaga agar Gerakan Teorisme, Ekstrimisme, dan Separatis tidak berkembang ke Xinjiang	54
III.2.1 Arti Penting Kawasan Xinjiang bagi Cina	54
III.2.2 Konflik Suriah dan Xinjiang	60
III.2.3 Gerakan Terorisme dan Separatis di Cina serta Hubungannya dengan Oposisi Teroris Konflik Suriah	62
BAB IV PENUTUP.....	67
IV.1 Kesimpulan	67
DAFTAR PUSTAKA.....	xi

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel III.1 Impor Minyak Mentah Cina tahun 2011.....	47
Tabel III.2 Investasi Cina di Timur Tengah	54



KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN

2011-2014

Abstrak

Penelitian ini berusaha menggambarkan kepentingan Cina dalam konflik Suriah sehingga ia mengambil kebijakan untuk mendukung penyelesaian konflik secara politik. Penelitian ini didasari pada perubahan sikap Cina yang sebelumnya tidak tertarik untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional berubah menjadi aktif. Sebagai contoh kurangnya peran Cina adalah pada kasus konflik Libya yang merupakan bagian dari gelombang Arab Spring. Dalam kasus Libya tersebut Cina memilih untuk tidak aktif, hal ini khususnya tercermin dalam kebijakannya untuk tidak melakukan veto dalam tiap resolusi DK PBB yang diajukan. Dalam konflik Suriah kemudian Cina berubah ikut berperan aktif untuk mendukung penyelesaian masalah secara politik. Cina setidaknya telah menggunakan empat dari total sepuluh vetonya hanya untuk kasus Suriah. Melalui kerangka pemikiran realisme defensif dan juga kepentingan nasional penelitian ini akan berusaha menjawab kepentingan Cina dibalik dukungannya untuk menyelesaikan masalah secara politik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini kemudian mendukung hipotesis bahwa Cina berkepentingan secara ekonomi dan juga keamanan. Dalam hal kepentingan ekonomi Cina berusaha menjaga kerjasama ekonomi dan kebutuhan potensial energinya dengan negara kawasan MENA. Kemudian dalam hal kepentingan keamanan Cina berusaha untuk memastikan gerakan terorisme, esktrimisme, dan separatisme tidak menyebar ke Cina khususnya di wilayah Xinjiang.

Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri, Cina, Konflik Suriah, minyak

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Suriah telah berlangsung sejak Maret 2011. Konflik ini merupakan lanjutan dari gelombang *Arab Spring* dimana warga di beberapa negara Afrika Utara dan Timur Tengah memprotes pemerintahan mereka dan melakukan aksi demonstrasi untuk menggulingkan penguasa. Mereka menuntut adanya revolusi pemerintahan yang lebih demokratis. Gelombang *Arab Spring* ini dimulai dari Tunisia, Mesir, Libya kemudian berlanjut ke Suriah. Pasukan oposisi di Suriah memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Assad dan keluarganya yang telah berkuasa kurang lebih selama empat dekade.

Aksi demonstrasi penduduk disikapi pemerintah Suriah dengan sikap represif. Dalam kasus Libya dan Suriah pemerintahan berkuasa sama-sama melakukan serangan militer terhadap pasukan oposisi.¹ Melihat sikap pemerintah tersebut warga Suriah kemudian mulai melakukan serangan balasan. Pada bulan Juli 2011, ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negeri. Pendukung oposisi akhirnya mulai mengangkat senjata dengan tujuan untuk mempertahankan diri mereka dan juga untuk mengusir pasukan pemerintah dari daerah lokal mereka.² Situasi kekerasan yang terus meningkat dengan serangan terus menerus dari pihak pemerintah dan munculnya pemberontak bersenjata pada akhirnya menyebabkan perang saudara pecah di Suriah. Konflik yang awalnya bermula di kota Deera dan

¹ Mu Ren, "Interpreting China's (Non-) Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis." *International Research Ritsumeikan* 27.1 (2014): 259-282.

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/Vol.27-1/27_1_12_Ren.pdf (diakses 14 Oktober 2014)

² "Syria : The Story of the Conflict" *BBC*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> (diakses 2 Oktober 2015).

berbagai kota kecil lainnya ini meluas sampai ke Ibukota Damaskus dan juga Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah. Pasukan oposisi berhasil merebut sebagian wilayah-wilayah di Suriah, sementara pasukan pemerintah terus menyerang pihak oposisi. Menurut data PBB selama tiga tahun konflik terjadi, lebih dari 100 ribu warga tewas serta lebih dari 2 juta orang mengungsi menuju ke negara-negara tetangga.³

Konflik Suriah ini kemudian berkembang tidak lagi pertempuran antara pemerintahan Presiden Assad dan kelompok oposisi tetapi muncul juga kelompok-kelompok sektarian yang melawan pemerintah. Dimensi konflik kian bertambah dengan munculnya kelompok jihad seperti *Islamic State* membuat konflik Suriah semakin bertambah kompleks. Negara-negara tetangga dan negara maju yang berkepentingan pada akhirnya juga terlibat dalam konflik Suriah. Adanya pelanggaran hak asasi manusia menjadi jalan masuk bagi Barat untuk medesak Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan aksi.

DK PBB kemudian mengajukan resolusi untuk mengatasi konflik Suriah. Namun penyelesaian masalah melalui resolusi ini juga belum membuahkan hasil. Cina bersama dengan Rusia telah memveto empat kali resolusi DK PBB terutama yang berkaitan dengan usaha intervensi kedaulatan Suriah. Sikap aktif Cina dalam hubungan internasional ini dapat dianggap sebagai sebuah anomali. Dalam hal hubungan internasional, Cina selama ini cenderung mengambil langkah pasif.⁴

Dalam konflik Libya dimana juga terjadi upaya intervensi militer misalnya, Cina tidak melakukan veto terhadap resolusi 1970 yang melarang pasukan senjata

³ Ren, "The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist," 259-282.

⁴ Hannah Beech, "China's View on Syria Crisis: America's "Hidden Motivations" Are Leading It Astray," *Time*, <http://world.time.com/2013/09/13/chinas-view-on-syria-crisis-americas-hidden-motivations-are-leading-it-astray/> (diakses 2 November 2015)

untuk tentara Qaddafi serta abstain pada resolusi 1973 yang menetapkan zona larangan terbang Libya dan melakukan aksi untuk melindungi warga dari serangan pemerintah Qaddafi.⁵ Sedangkan dalam konflik Suriah Cina telah menggunakan empat kali hak veto. Tercatat Cina telah menggunakan hampir setengah (empat dari sepuluh) dari keseluruhan hak vetonya hanya untuk konflik Suriah.

Berbeda dengan di Libya, dalam konflik Suriah Cina mengambil sikap untuk melawan usaha intervensi yang dilakukan Amerika dan negara-negara Barat di DK PBB. Posisi Cina dalam konflik Suriah sendiri semakin ditegaskan oleh presiden Xi Jinping pada bulan September 2013. Ia berpendapat bahwa solusi politik merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk mengatasi krisis Suriah dan serangan militer tidak akan bisa memecahkan masalah dari akarnya.⁶

Di DK PBB Cina menolak setiap resolusi yang memungkinkan adanya intervensi dan sanksi bagi pemerintahan Suriah. Pada resolusi pertama Cina memveto draf proposal yang diajukan oleh negara-negara Uni Eropa. Draft tersebut berisi ancaman sanksi terhadap pemerintah Suriah jika mereka tidak segera menghentikan tindak kekerasan terhadap warga. Dalam resolusi ini Cina memveto dengan alasan dokumen tersebut dapat diartikan sebagai campur tangan dalam urusan internal Suriah sehingga dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah.⁷

⁵ Yoram Evron, "Chinese Involvement in the Middle East: The Libyan and Syrian Crises." *Strategic Assessment* 16:3(Oktober 2013)
http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan16_3ENG3.pdf_Evron.pdf (diakses 25 September, 2014)

⁶ Beech, "China's View on Syria Crisis."

⁷ Justyna Szczudlik-Tatar, "China's Position During the Crisis in Syria" *The Polish Institute of International Affairs* 76:409, (8 Agustus 2012)
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151385/ipublicationdocument_singledocument/79f

Dalam veto keduanya Cina menolak draf proposal yang didukung oleh Liga Arab dimana menyerukan presiden Assad untuk mundur. Cina kali ini berpendapat bahwa resolusi tersebut memungkinkan terjadinya intervensi militer di Suriah.⁸ Pada veto ketiga Cina kembali menolak draf proposal yang menyerukan Assad untuk segera menarik pasukannya. Resolusi yang dirancang oleh Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Jerman ini dianggap Cina hanya menempatkan tekanan pada satu pihak yaitu pemerintahan Assad. Cina beranggapan bahwa jika proposal ini disetujui maka akan memperburuk gejolak dan mungkin akan meluas ke wilayah lainnya.⁹ Terakhir Cina juga memveto draf proposal dari Prancis yang mengajukan konflik Suriah untuk dibawa ke International Criminal Court (ICC).

Selain dukungan secara politik melalui DK PBB, Cina bersama dengan Rusia dan Iran menurut Deputy Perdana Menteri Suriah Kadri Jamil juga membantu Suriah secara militer dan juga ekonomi.¹⁰ Pada bulan September 2013 ketika Amerika Serikat mengancam akan menyerang Suriah, Cina bersama dengan Rusia justru mengerahkan kapal perang di pantai Suriah untuk terus mengamati situasi dan mempertahankan kehadiran angkatan laut di Mediteranian Timur.¹¹

Cina menurut Kadri Jamil juga bergabung dengan Iran dan Rusia untuk memberikan bantuan minyak dan kredit sebesar \$500 juta per bulan kepada Suriah. Perlu diketahui bahwa mayoritas minyak Suriah berada di sebelah utara

e8431-72d0-49eb-9a29-389a2c3b7034/en/Bulletin+PISM+No+76+(409)+August+8+2012.pdf.
(diakses 8 November 2014)

⁸ Justyna Szczudlik-Tatar

⁹ Justyna Szczudlik-Tatar

¹⁰ Christina Lin, "Why China Support Assad : Asian Jihad Hits Syria," *Trans Atlantic Academy*
<http://www.transatlanticacademy.org/node/611> (diakses 2 November 2015).

¹¹ Lin, "Why China Support Assad"

dan timur laut dimana sebagian besar wilayahnya dikuasai pemberontak. Jaringan pipa yang menghubungkan sumur ke pusat-pusat penduduk juga rentan terhadap serangan pemberontak.¹² Akibatnya, produksi minyak Suriah jatuh sebanyak 95 persen selama konflik berlangsung. Oleh karena itu bantuan dari Cina juga tidak bisa dianggap remeh.¹³ Bantuan keuangan dan materi dari Cina bersama dengan Rusia dan Iran telah memungkinkan pasukan militer Assad dapat bekerja secara efektif.

Dalam konflik Suriah ini selain terlihat mendukung pemerintahan Assad, Cina juga membuka peluang bagi pihak oposisi untuk menyelesaikan masalah. Pada bulan April 2014 menteri luar negeri Cina, Wang Yi bertemu dengan pemimpin oposisi dari Syrian National Coalition, Ahmad Jarba. Pada pertemuan itu Cina mencoba menegaskan bahwa ia mendukung penyelesaian masalah secara politik dalam konflik Suriah. Wang Yi mengungkapkan bahwa Cina akan terus berkomunikasi dan berdialog dengan seluruh pihak yang terlibat.¹⁴ Dari peristiwa ini kemudian dapat dilihat bahwa dalam konflik Suriah Cina selain mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad juga membuka dialog dengan pihak oposisi.

Kehadiran kelompok teroris seperti Jabhat Al-Nusra dan juga ISIS semakin menambah pelik permasalahan Suriah. ISIS bertujuan untuk menumbangkan rezim di Iraq dan Suriah dan menegakkan kepemimpinan Sunni. Berdasarkan laporan dari Independent International Commission of Inquiry in Syrian Arab Republic, ISIS telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan

¹²Hugo Brennan, "China's Syria Connection" *National Interest*
<http://nationalinterest.org/commentary/chinas-syria-connection-8859> (diakses 3 November 2015)

¹³Brennan, "China's Syria Connection"

¹⁴"Syrian opposition chief meets Chinese foreign minister in Beijing," *Reuters*,
<http://www.reuters.com/article/2014/04/16/us-china-syria-idUSBREA3F0ZS20140416> (diakses 4 November 2015)

melawan kemanusiaan.¹⁵ Cina secara jelas sepihak dengan Eropa dan Amerika untuk mengecam aksi ISIS di Suriah.¹⁶ Cina menganggap bahwa semua negara harus membuat upaya bersama untuk menindak "three evil" yaitu terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Cina memiliki kekhawatiran bahwa penduduk mereka yang berangkat jihad ke Suriah dan mendukung ISIS akan kembali ke tanah air dan memberikan ancaman baru terhadap keamanan regional.

Pemerintah Cina mengklaim bahwa sejak 2012 militan Uighur dari Xinjiang telah bergabung dengan pemberontak di Suriah melawan rezim Assad. Salah satu militan kembali ke Xinjiang dan berhasil ditangkap ketika merencanakan untuk melakukan serangan kekerasan di Cina.¹⁷ Pejabat kontra-teror China juga telah menyatakan keprihatinan bahwa kelompok militan Uighur seperti ETIM dan TIP telah merekrut sekitar 25.000 orang ditambah penduduk diaspora Uighur di Istanbul¹⁸

Cina sendiri dalam krisis Suriah selalu mengecam serangan di Suriah dan meminta semua pihak untuk menyelesaikan konflik secara politik.¹⁹ Hal ini ditunjukkan Cina dengan menyetujui resolusi DK PBB dalam konflik Suriah yang tidak berhubungan dengan intervensi militer. Seperti pada resolusi nomor 2042 tentang penyebaran 30 pengamat tanpa senjata dan resolusi nomor 2043 tentang pembentukan UN Supervision Mission in Syria (UNSMIS). Selain itu Cina juga menyetujui Annan Sixpoint Plan, perpanjangan mandat UNSMIS serta mengikuti komunike Action Group for Syria.

¹⁵ Institute for Strategic Studies "International Strategic Relations and China National Security" World Scientific Publishing, 2015 hal.64

¹⁶ informasi mengenai kecaman terhadap Suriah dapat dilihat di <http://thediplomat.com/2014/09/china-and-the-isis-threat/>

¹⁷ Ren, "The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist," 259-282

¹⁸ Lin, "Why China Support Assad"

¹⁹ Justyna Szczudlik-Tatar, "China's Position".

Cina tidak mempunyai kepentingan secara langsung kepada pemerintahan Assad. Dilihat dari aspek ekonomi diantara kedua negara kemudian terlihat bahwa Suriah bukan merupakan partner strategis bagi Cina di Timur Tengah. Jumlah total ekspor Cina ke Suriah pada tahun 2011 hanya senilai \$ 2,4 miliar dan impor barang senilai \$ 26 juta.²⁰ Jumlah ekspor Cina ke Suriah memang menjadikan Cina sebagai pemasok terbesar produk impor Suriah dalam beberapa tahun terakhir. Namun bagi Cina sendiri angka tersebut masih jauh lebih kecil. Bahkan angka ekspor ini menurun 50 persen pada tahun 2012 menjadi senilai \$ 1,1 miliar.²¹ Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa Suriah bukan mitra dagang utama bagi Cina dan bukan merupakan negara pemasok energi yang signifikan.

Walaupun dalam pandangan Cina Suriah bukan merupakan partner strategis tetapi peningkatan kerjasama kedua negara masih terus dilakukan. Ditinjau dari sejarahnya Assad pernah berkunjung ke Beijing pada tahun 2004 untuk pembentukan Suriah-Cina Business Council²². Cina juga berinvestasi di sektor minyak dan terus membeli minyak untuk mendukung kelangsungan rezim Suriah di tengah sanksi PBB. Perusahaan minyak milik negara di Cina yaitu China National Petroleum Corporation memiliki saham di dua perusahaan minyak terbesar Suriah dan telah menandatangani kesepakatan bernilai miliaran dolar untuk membantu kegiatan eksplorasi dan pengembangan²³. Perusahaan milik Cina lainnya, Sinochem, memiliki 50 persen saham di salah satu ladang minyak terbesar Suriah. China juga telah melangkah sebagai pembeli minyak mentah

²⁰ "What is China's Role in Syria?" *International Business Times* <http://www.ibtimes.com/what-chinas-role-syria-214021> (diakses 12 November 2015)

²¹ Shannon Tiezi, "China at Geneva II: Beijing's Interest in Syria," *The Diplomat* <http://thediplomat.com/2014/01/china-at-geneva-ii-beijings-interest-in-syria/> <http://thediplomat.com/2014/01/china-at-geneva-ii-beijings-interest-in-syria/> (diakses 12 November 2015)

²² Evron, "Chinese Involvement in the Middle East,"

²³ Evron, "Chinese Involvement in the Middle East,"

Suriyah pasca embargo Uni Eropa pada tahun 2011²⁴. Terlepas dari berbagai kerjasama tersebut Suriyah nampak menjadi negara yang lebih bergantung pada Cina.

Kebijakan Cina untuk mendukung pemerintahan Assad sementara di sisi lain juga berusaha menyelesaikan konflik secara politik dengan melibatkan semua pihak yang mempunyai hak bagaimanapun juga didasari oleh faktor kepentingannya. Berbeda dengan Rusia yang memiliki kepentingan jelas di Suriyah, lebih sulit untuk menjelaskan kepentingan Cina di Suriyah. Rusia telah lama memberikan dukungan militer dan diplomatik kepada pemerintah Suriyah. Rusia juga telah memasok banyak senjata dan tank kepada Suriyah. Jika rezim Assad jatuh maka Rusia akan kehilangan banyak pengaruhnya di Timur Tengah. Cina di sisi lain tidak memiliki kepentingan langsung di Suriyah. Cina tidak menjual senjata kepada dan tidak memiliki hubungan dagang yang erat dengan Suriyah.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Apa kepentingan Cina dalam konflik Suriyah sehingga ia mendukung pemerintahan Bashar Al-Assad dan mengutamakan penyelesaian masalah secara politik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari apa sebenarnya kepentingan Cina dalam konflik Suriyah sehingga Cina mengutamakan penyelesaian konflik Suriyah secara politik.

²⁴ Evron, "Chinese Involvement in the Middle East,"

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Bagi Ilmu Hubungan Internasional penelitian ini akan memperkaya studi tentang Cina sebagai sebuah negara yang tengah bertransisi dari negara berkembang menuju negara maju. Selain itu juga penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian mengenai analisis kebijakan luar negeri suatu negara. Bagi masyarakat umum pemerhati masalah internasional dan juga pemerintah, penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Cina di era kontemporer.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Teori Realisme Defensif

Teori realisme defensif mengasumsikan bahwa sistem anarki internasional bersifat lebih lunak. Keamanan kemudian tidak bersifat langka tetapi berlimpah. Dalam dunia realisme defensif negara secara rasional mengejar keamanan dengan cara yang lebih lunak. Negara bertindak hanya untuk menanggapi ancaman eksternal yang menurut pemikir realisme defensif jarang terjadi. Bahkan negara-negara pada umumnya menanggapi ancaman tersebut dengan cara menyeimbangkan (balancing) kekuatan dengan negara yang dianggap mengancam. Negara memilih untuk menghambat negara lawan dan sebisa mungkin menjauhi kemungkinan konflik secara langsung. Kebijakan luar negeri menurut pandangan realisme defensif adalah ketika negara rasional bereaksi dengan tepat karena adanya dorongan dari sistem. Negara hanya akan berkonflik ketika dihadapkan pada dilema keamanan yang tinggi.

Realisme defensif kemudian melihat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh sistem, tetapi dalam prakteknya mereka bergantung pada kedua variabel

sistemik dan domestik untuk memperhitungkan berbagai jenis perilaku kebijakan luar negeri. Realisme defensif melihat sistem internasional sebagai penyebab dari perilaku "wajar" negara. Agresi terjadi hanya jika teknologi militer atau faktor-faktor tertentu lainnya memberikan insentif yang jelas bagi negara untuk menyerang lebih dulu. Mereka menganggap bahwa perilaku agresif menjadi "tidak wajar" dan harus memperhitungkan hipotesis tambahan yang melibatkan variabel domestik.²⁵

Dalam dunia realisme defensif negara mencari keamanan dengan cara bertahan dan mereka secara konstan tidak mencari dan meraih kesempatan untuk mengancam negara lain.²⁶ Konflik kepentingan mungkin akan tetap terjadi tetapi hal ini tetap dapat diselesaikan secara damai. Walaupun begitu realisme defensif masih tetap percaya bahwa perang memang tak bisa dihindari. Realisme defensif mengakui bahwa memang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk menghindari perang diantara dua negara "ofensif".²⁷ Perdamaian stabil kemudian dapat tercipta dari dua negara yang menganut realisme defensif jika kedua negara telah memperhitungkan seberapa lunak negaranya sendiri dan juga menghitung seberapa lunak negara lawan serta melakukan kerjasama secara terus menerus.²⁸

Ketika negara defensif dan ofensif bertemu situasi menjadi semakin kompleks. Hubungan kedua negara menjadi tergantung pada seberapa besar negara defensif mampu melakukan pencegahan (deterrence) dan bertahan melawan negara

²⁵ Gideon Rose, "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics* (1998): 144-172. <http://www.jstor.org/stable/25054068> hal.152

²⁶ Shiping Tang, *A Theory of Security Strategy for Our Time : Defensive Realism* (New York:Palgrave MacMillan 2010), .107

<http://www.palgraveconnect.com/pc/doi/finder/view/10.1057/9780230106048>

²⁷ Dalam buku *A Theory of Security Strategy for Our Time : Defensive Realism* dari Shiping Tang disebutkan dua bentuk negara yaitu negara ofensif dan negara defensif. Negara ofensif adalah negara yang memang bertujuan untuk berkonflik secara langsung sementara negara defensif lebih cenderung menghindari konflik.

²⁸ Tang, *A Theory of Security Strategy* 107

ofensif. Kestabilan perdamaian diantara kedua negara bagaimanapun juga tergantung pada apakah negara realis defensif berhasil meyakinkan negara realis ofensif untuk tidak melakukan agresi. Jika negara ofensif dapat berubah pikiran maka perdamaian yang stabil akan mungkin terjadi tetapi jika negara realis ofensif terus menekan dengan tujuan agresif maka perang akan tetap pecah. Pada akhirnya realisme defensif melihat peluang yang lebih baik bagi kondisi perdamaian yang stabil, meskipun perdamaian tergantung pada banyak faktor dan kontinjensi.²⁹

Realisme defensif menurut Shiping Tang mengambil istilah dari Schweller (1996) benar-benar mempunyai sikap defensif yang jelas. Pertama, realisme defensif pada umumnya menggunakan cara defensif untuk menyokong dirinya sendiri. Menurut Waltz (1979) dan Walt (1987) karena balancing merupakan suatu hal yang lazim, maka usaha untuk mengejar ekspansi dan penaklukan akan selalu diimbangi oleh negara-negara lain, sehingga mereka akhirnya akan dikalahkan. Dengan demikian, cara terbaik menuju keamanan tidak melalui ekspansi dan penaklukan, tetapi melalui sikap moderat dan penahanan diri (self restraint).³⁰

Kedua, tidak seperti realisme ofensif yang menekankan keuntungan potensial dari penaklukan, realisme defensif pada umumnya malah menekankan bahaya *overextension* (Jervis 1978; Snyder 1991; Kupchan 1994). Ketiga, dengan berasumsi bahwa dilema keamanan hanya dapat dikurangi dampaknya dan tidak dapat diatasi secara menyeluruh, realisme defensif kemudian tidak hanya menolak

²⁹ Tang, *A Theory of Security Strategy* 107

³⁰ Tang, *A Theory of Security Strategy* 109

secara umum realisme ofensif tetapi juga merekomendasikan sikap moderasi, menahan diri, dan pada akhirnya kerjasama (Glaser 1994-1995; Jervis 1978).

Keempat, realisme defensif menganggap perlombaan senjata umumnya suboptimal ketika tidak menghadapi ancaman yang jelas (Glaser 1992; 1994-1995; 2004). Perlombaan senjata menurut realisme defensif menjadi pilihan rasional hanya ketika negara menghadapi lawan yang menunjukkan tanda-tanda agresif. Selain itu karena realisme defensif tidak bertujuan untuk penalukkan atau ekspansi maka investasi senjata dilakukan dalam rangka meningkatkan pertahanan bukan untuk melakukan penyerangan. Kelima, aliansi menurut realisme defensif secara eksklusif digunakan untuk tujuan pertahanan.

Keenam, meskipun perang preventif merupakan pilihan potensial ketika menghadapi (potensial) ancaman, realisme defensif tidak mempertimbangkan pilihan itu untuk menjadi pilihan yang bijak kecuali dalam keadaan ekstrim.³¹ Dengan kata lain tujuan strategis dari negara realis defensif sebagian adalah untuk pencegahan dan pertahanan daripada untuk ekspansi. Ketujuh, realisme defensif menekankan kelemahan dari tujuan untuk memperluas perang. Terakhir, untuk mengurangi biaya perang realisme defensif dapat mengambil tindakan sepihak untuk mengurangi tekanan internasional.

Dalam konflik Suriah sikap Cina dalam konflik Suriah dimana ia mendukung penyelesaian masalah secara politik dan menolak adanya perang dapat dijelaskan melalui teori realisme defensif. Cina memandang sikapnya tersebut sebagai alat untuk menjaga kepentingan Cina dalam hubungan internasional.

³¹ Shiping Tang, hal.109

I.5.2 Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan di suatu negara untuk menghadapi negara lain atau aktor politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.³² Dengan demikian kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakatnya, meski kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu juga ditentukan oleh siapa yang berkuasa dalam kurun waktu tersebut.³³

Kepentingan nasional sendiri dapat diklasifikasikan menjadi kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan budaya.³⁴ Dari masing-masing kategori tersebut dapat dibagi lagi kedalam kepentingan yang lebih konkrit. Kepentingan politik dapat dibagi dalam kemerdekaan politik, kedaulatan negara, dan status internasional, dll. Kepentingan keamanan dapat dibagi menjadi superioritas militer, keamanan teritorial, kepentingan maritim dan sebagainya. Kepentingan ekonomi dapat dibagi ke dalam perdagangan ekspor / impor, finansial internasional, investasi luar negeri, impor / ekspor teknologi, dll. Kepentingan budaya mungkin termasuk penyebaran budaya nasional, perlindungan dari ide budaya asing, dll.

Dalam konflik Suriah ini sendiri penulis menggunakan kepentingan ekonomi dan keamanan sebagai dua faktor utama Cina dalam melakukan kebijakan luar negerinya. Hal ini secara lebih spesifik dijelaskan oleh Yan Xue

³² Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), 5.

³³ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1994), 184.

³⁴ Yan Xue Tong, "Analysis of China National Interest" .19
http://cns.miiis.edu/books/pdfs/china_national_interests.pdf

Tong dalam bukunya *Analysis of China National Interest*.³⁵ Ia menyebutkan bahwa prinsip dasar dari kebijakan luar negeri Cina yang diumumkan secara resmi setelah Kongres Partai ke-12 telah mengkonfirmasi bahwa kepentingan ekonomi dan keamanan Cina lebih penting daripada kepentingan politik dan budaya.

Tujuan utama Cina untuk melakukan percepatan dan pembangunan ekonomi tentu saja ditentukan oleh kepentingan ekonominya. Setelah Perang Dingin, ekonomi menjadi perhatian utama. Tanpa adanya pondasi ekonomi yang kuat maka negara tidak akan menjadi negara kaya dan kuat. Untuk itu kepentingan ekonomi merupakan hal yang paling mendasar. Laporan pada Kongres Partai ke-14 dengan jelas menyatakan bahwa "keterbelekangan ekonomi akan menyebabkan negara dalam posisi pasif dan memungkinkan suatu negara untuk dikontrol oleh negara lain. Hal ini semakin ditunjukkan oleh realitas dunia saat ini dimana kompetisi internasional ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi menjadi kunci terutama setelah berakhirnya Perang Dingin 1990.

Dalam konflik Suriah Cina kemudian masih tetap mengedepankan kepentingan ekonominya. Kebijakan luar negerinya untuk menyelesaikan masalah secara politik akan mengamankan kepentingan ekonomi Cina di wilayah ini berupa hubungan ekonomi dengan negara Timur Tengah dan juga yang lebih penting adalah memastikan pasokan energi minyak dan gas tetap mengalir ke Cina.

³⁵ Xue Tong, "Analysis of China National Interest" 72

Lebih lanjut menurut Yan Xue Tong prinsip unifikasi nasional membuat kepentingan keamanan China lebih penting dari kepentingan politik dan budaya. Pengalaman dari pecahnya Uni Soviet telah membuat kemampuan Russia menurun baik secara politik, ekonomi dan militer. Hal ini tentu saja dijadikan bahan pertimbangan agar bahaya perpecahan nasional tersebut tidak terjadi di Cina. Dengan demikian, pentingnya kepentingan keamanan ditingkatkan oleh kekhawatiran atas potensi perpecahan nasional.

Cina kemudian juga mengurangi kepentingannya dengan berprinsip untuk meninggalkan konflik ideologis dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama dengan semua negara. Setelah Perang Dingin, perdebatan besar antara sistem sosialis dan kapitalis untuk sementara telah dihentikan. Perdebatan ini dianggap tidak akan menguntungkan bagi perkembangan kekuatan produktif, atau meningkatkan kekuatan nasional, atau juga tidak akan meningkatkan standar hidup penduduk Cina. Oleh karena itu Cina telah menghentikan perdebatan tentang perbedaan sosialisme dan kapitalisme. Dengan demikian, mereka pada dasarnya meninggalkan argumen ideologis dan tidak akan terlalu menekankan kepentingan politik umum.³⁶

I.6 Hipotesis

Keuntungan Cina dalam konflik Suriah sehingga ia berusaha untuk menyelesaikan konflik secara politik adalah untuk 1) kepentingan ekonomi yaitu menjaga kerjasama ekonomi dan kebutuhan potensial energi dengan negara kawasan MENA dan 2) kepentingan keamanan yaitu memastikan gerakan

³⁶ Xue Tong, "Analysis of China National Interest" 73

terorisme, esktrimisme, dan separatisme tidak menyebar ke Cina khususnya di wilayah Xinjiang.

I.7 Metodologi Penelitian

I.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

I.7.1.1 Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi suatu negara dapat dibagi ke dalam beberapa aspek diantaranya adalah perdagangan ekspor / impor, investasi luar negeri, impor / ekspor teknologi, dll.³⁷

I.7.1.2 Kerjasama Ekonomi dan Kebutuhan Potensial Energi

Kerjasama ekonomi merupakan suatu hubungan kerjasama antar negara di dunia. Kerjasama ekonomi dalam penelitian ini sendiri merujuk pada kerjasama bilateral antara Cina dengan negara-negara di kawasan MENA. Bnetuknya dapat berupa perdagangan ekspor/impor dan investasi luar negeri.

Sedangkan kebutuhan potensial energi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya minyak dan gas. Seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi Cina, negara ini membutuhkan sumber daya minyak dan gas yang lebih tinggi dan kebutuhan itu dapat dipenuhi sebagian besar dari kawasan MENA³⁸.

I.7.1.3 Kepentingan Keamanan

Kepentingan keamanan dapat dibagi menjadi superioritas militer, keamanan teritorial, kepentingan maritim dan sebagainya.³⁹ Dalam penelitian ini yang dimaksud penulis dengan kepentingan keamanan sendiri adalah khusus mengenai keamana teritorial dimana stabilitas wilayah Xinjiang menjadi perhatian utama

³⁷ Xue Tong, "Analysis of China National Interest" 73

³⁸ MENA : Middle East and North Africa

³⁹ Xue Tong, "Analysis of China National Interest" 73

I.7.1.4 Gerakan terorisme, ekstrimisme, dan separatisme

Konsep perlawanan terhadap gerakan terorisme, ekstrimisme dan separatisme muncul pertama kali pada tahun 2001. Konsep ini di kalangan organisasi Shanghai Cooperation Organization (SCO) disebut sebagai "three evil". Melalui (SCO) yang dipimpin oleh Cina, para anggota menandatangani "Konvensi Shanghai Pemberantasan Terorisme, Separatisme dan Ekstrimisme. Ketika itu anggota SCO menganggap dirinya sebagai organisasi pelopor untuk menangani terorisme di tingkat internasional.

Dalam kasus Suriah Cina secara tegas bersama negara-negara Barat dan juga Rusia melawan pihak oposisi pemberotak yang mempunyai kaitan dengan gerakan terorisme seperti Jabhat Al-Nusra dan juga ISIS.

I.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu untuk kemudian dianalisis. Dalam prakteknya penelitian ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut. Fenomena yang digambarkan dalam penelitian ini sendiri adalah konflik Suriah dan kebijakan luar negeri Cina. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menjelaskan kepentingan Cina dalam mendukung penyelesaian konflik Suriah secara politik.

I.7.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai dari Oktober 2011 sampai Desember 2014. Batasan awal dipilih karena keterlibatan Cina dalam konflik Suriah dimulai pada Oktober 2011 ketika Cina pertama kali memveto resolusi DK PBB dalam

kaitannya dengan konflik Suriah. Batas akhir dipilih sampai dengan Desember 2014 karena sampai periode tersebut konflik masih berlangsung dan tidak ada perkembangan signifikan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yaitu memperoleh data dari sumber yang sudah ada. Data yang dikumpulkan sendiri berupa dokumen-dokumen dari buku, jurnal ilmiah, artikel online, website, berita, dan laporan resmi dari organisasi internasional seperti PBB dan Amnesty Internasional

I.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan menganalisis informasi yang didapat dalam bentuk kalimat.⁴⁰

I.7.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab.

Bab 1 adalah bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesis dan metodologi penelitian.

Bab 2 membahas tentang kebijakan luar negeri Cina dimulai dari dasar kebijakan luar negeri Cina secara keseluruhan dan lebih spesifik kebijakan luar negeri Cina di Suriah.

Bab 3 membahas tentang kepentingan Cina dalam konflik Suriah

Bab 4 berisi kesimpulan dan penutup

⁴⁰ Blaxter et al. , *How to Research*, terj. (Jakarta: Indeks, 2006), 251-252.

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA

II.1 Dasar Kebijakan Luar Negeri Cina

Sejak tahun 1980 dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Cina menggambarkan dirinya sebagai negara Dunia Ketiga yang mengejar "an independent of foreign policy and peace".⁴¹ Sebagai negara Dunia Ketiga, Cina memposisikan dirinya sebagai negara berkembang dan tidak terikat pada satu blok manapun yang berkuasa saat itu yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Secara resmi, tujuan dasar dari kebijakan luar negeri Cina adalah "to preserve China's independence, sovereignty and territorial integrity," dan "to create a favorable international environment for China's reform and opening up and modernization."

Dasar dari kebijakan luar negeri Cina tersebut berasal dari *Five Principles of Peaceful Coexistence*. Kelima prinsip hidup berdampingan secara damai tersebut adalah : saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, tidak melakukan agresi satu sama lain, tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, kesetaraan dan saling menguntungkan, dan hidup berdampingan secara damai. Kelima prinsip ini pertama kali disebutkan pada tahun 1954 ketika Cina dengan pemerintahan komunisnya berusaha untuk menjangkau negara-negara non-komunis di Asia.⁴²

Lima prinsip hidup berdampingan secara damai ini sampai sekarang masih menjadi pedoman Cina dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Cina

⁴² "Principles of China Foreign Policy" *Asia For Educators*,
http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_forpol_principles.htm (diakses 9 November 2015)

menekankan kesamaan dan penghormatan akan kedaulatan kepada semua negara baik negara besar maupun kecil, Barat dan non-Barat, kaya dan miskin, demokratis dan otoriter, masing-masing berhak untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan standar barat atau tidak. Istilah lain untuk sistem tersebut menurut Cina adalah multipolaritas.⁴³ Lima prinsip ini kemudian yang menjelaskan mengapa Amerika tidak bisa memaksakan nilai-nilai yang dianutnya untuk diaplikasikan pada negara-negara yang lebih lemah. Dengan demikian gagasan inti dibalik Lima Prinsip tersebut adalah bahwa negara tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain.

Dengan prinsip ini maka posisi Cina ketika dihadapkan dengan konflik di seluruh dunia dapat diperkirakan. Cina selalu menekankan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara negosiasi damai. Hal ini nampak pada sikap Cina antara lain di perang Iran dan Iraq, perjuangan Israel dan Arab, persaingan antara Korea Selatan dan Utara, dan juga konflik di negara-negara bekas Yugoslavia. Di PBB, Cina juga sering menolak atau menahan diri ketika pengambilan suara di DK PBB berkaitan dengan pemberian sanksi kepada suatu negara, intervensi atau invasi ke suatu negara, serta masalah-masalah yang berkaitan dengan perang dan terorisme. Sebagai anggota tetap DK PBB Cina beberapa kali bersikap tegas dengan menggunakan hak vetonya untuk melawan negara-negara yang mendukung intervensi seperti di konflik Suriah. Cina juga sering memutuskan untuk tidak memilih atau abstain pada masalah-masalah yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan Cina. Dengan abstain maka Cina membiarkan kemungkinan

⁴³ "Principles of China Foreign Policy"

intervensi terjadi tanpa harus membalikkan komitmen Cina untuk non-intervensi negara lain.⁴⁴

Paska Perang Dingin, Cina mulai mendefinisikan konsep keamanan nasionalnya. Secara resmi konsep ini dinamakan New Concept Security (NSC) dan disebutkan dalam dokumen kertas putih pertahanan China National Defence Juli 1997.⁴⁵ NSC merupakan inisiatif Cina untuk beralih keamanan secara mandiri (self help security) menjadi keamanan bersama (mutual security).⁴⁶ Cina juga menegaskan untuk berpindah dari negara yang bermental terjajah menuju sebuah negara yang lebih percaya diri dan menjadi kekuatan global yang bertanggung jawab, siap untuk memainkan peran kepemimpinan.

Isi dari dokumen NSC sendiri secara sederhana tertulis di Defence White 1998 paper. Disitu ditulis bawa "Security cannot be guaranteed by an increase in arms, or by military alliances. Security should be based on mutual trust and common interests. We should promote trust through dialogue, seek security through cooperation, respect each other's sovereignty, solve disputes through peaceful means and strive for common development."

Konsep ini secara singkat mengidentifikasi bahwa paska Perang Dingin keamanan nasional tidak hanya terbatas pada aspek militer tetapi juga non-militer seperti ekonomi, ideologi, lingkungan / masyarakat, dan ilmu pengetahuan & teknologi. Para pemimpin generasi ketiga dari Republik Rakyat Cina telah memproyeksikan konsep lingkungan strategis baru paska Perang Dingin yang menurut mereka ditandai dengan perdamaian dan pembangunan. Ancaman

⁴⁴ "Principles of China Foreign Policy"

⁴⁵ David M. Finkelstein, "China's New Concept Security", (Paper dipresentasikan pada National Defense University Conference: The Evolving Role of the People's Liberation Army in Chinese Politics, Washington DC 30 Oktober 2005)

⁴⁶ "China's Position Paper on the New Security Concept", *China Report*, (2002) 39(128) 1-5.

kemudian tidak lagi berkaitan dengan hal-hal tradisional seperti penggunaan *hard power* tetapi juga ancaman non-tradisional seperti degradasi lingkungan, terorisme, narkoba, perdagangan, migrasi, keamanan energi, dan penyakit (seperti SARS, HIV / AIDS dll).⁴⁷ Dalam era baru setelah Perang Dingin mereka berpendapat bahwa keamanan harus didasarkan pada prinsip saling percaya dan kepentingan bersama.⁴⁸

Di dalam konsep keamanan tersebut lebih rinci disebutkan bahwa kekuatan militer digunakan untuk menjaga kedaulatan teritorial dan integritas negara, menolak agresi asing dan menjaga unifikasi negara.⁴⁹ Oleh karena itu pengembangan kekuatan militer dan persenjataan selepas Perang Dingin masih perlu untuk dilakukan. Terlebih Cina masih mengalami beberapa ancaman teritorial seperti klaim atas laut Cina Timur (Diaoyu dalam bahasa Cina dan Senkaku dalam bahasa Jepang), laut Cina selatan (pulau Spratly dan Parcel), negara bagian India Arunachal Pradesh (Selatan Tibet menurut Cina) dan juga Taiwan. Dari semua masalah teritorial tersebut Taiwan memberikan tantangan militer yang serius. Kemerdekaan de jure Taiwan mungkin akan membuka jalan bagi pemisahan wilayah lain Cina seperti di Xinjiang, Tibet, dan Mongolia.⁵⁰ Selain berfokus secara domestik pasukan militer dari semua negara harus memainkan peran dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti menindak terorisme dan perdagangan narkoba, misi penyelamatan dan juga bantuan kemanusiaan.

⁴⁷ Anil Kumar, "New Security Concept of China : An Analysis" Institute of Peace and Conflict Studies, (2012) New Delhi : India

⁴⁸ Anil Kumar, "New Security Concept"

⁴⁹ Anil Kumar, "New Security Concept"

⁵⁰ Anil Kumar, "New Security Concept"

Selain keamanan secara militer NSC juga memasukkan keamanan non-tradisional. Terorisme bersama dengan ekstremisme dan separatisme adalah tantangan keamanan internal utama yang dihadapi oleh China di provinsi Xinjiang.⁵¹ Dorongan untuk berpisah dari Cina diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya antara suku Han dan masyarakat lokal dan juga isu etnis dan hubungan agama yang lebih erat antara Uyghur dan Uzbek daripada suku Uygur ke Cina. Selain terorisme dan separatisme operasi penyelamatan juga menjadi perhatian mengingat Cina termasuk ke dalam negara yang rawan gempa. Kemudian masalah perdagangan narkoba sepanjang "Golden Triangle" yang melibatkan Cina daratan, Hong Kong dan Makau telah menjadi tantangan besar bagi People Liberation Army⁵² terlebih setelah ekonomi Cina terintegrasi ke dalam ekonomi dunia sejak kebijakan Reformasi dan Terbuka (gaige kaifang) oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978.

Aspek politik atau keamanan rezim (ideologi) juga ditegaskan dalam dokumen NSC. Di dalam dokumen dinyatakan bahwa "lembaga politik dan sistem negara tidak dapat diubah oleh negara lain, pelanggaran batas-batas kedaulatan negara dan unifikasi tidak dapat ditoleransi dan tidak ada negara yang dapat ikut campur dalam urusan internal negara lain. Di panggung internasional semua negara, besar atau kecil, miskin atau kaya, semua sama. Negara besar seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengintimidasi negara kecil dan lemah. Dalam urusan politik internasional, negara adidaya seharusnya tidak diperbolehkan memerintahkan negara-negara lain untuk mengejar politik kekuasaan dan

⁵¹ Anil Kumar, "New Security Concept"

⁵² People Liberation Army (PLA) merupakan pasukan bersenjata Cina dibawah kepemimpinan partai Komunis

memaksakan nilai-nilai yang mereka anut pada negara lain. Hal ini adalah prasyarat yang sangat diperlukan untuk keamanan global dan regional."⁵³

Dimasukkannya aspek keamanan rezim pada NSC menunjukkan bahwa Cina ingin mempertahankan kepemimpinan komunisnya. Kemanan politik menjadi lebih menantang bagi rezim komunis Cina terlebih setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 dan timbulnya perlawanan terhadap ideologi komunis. Saling ketergantungan ekonomi atas Amerika Serikat juga menimbulkan dilema dalam hal menggunakan komunis sebagai sebuah ideologi negara atau mengadopsi sistem demokrasi kapitalis. Wu Xinbo, seorang profesor di Pusat Studi Amerika di Universitas Fudan berpendapat bahwa Cina menghadapi dua sumber ancaman bagi keamanan politik, yaitu, evolusi damai⁵⁴ dan liberalisme borjuis.⁵⁵ Rezim komunis di Beijing sejak tahun 1950 telah percaya bahwa dunia kapitalis yang dipimpin oleh Uni Eropa dan AS telah menggunakan dua cabang strategi untuk menyabotase rezim komunis di seluruh dunia yaitu dengan penahanan militer (containment) dan evolusi damai. Bagi mereka, Barat telah berhasil menggunakan strategi ini dalam kasus runtuhnya Uni Soviet dan sekarang Cina adalah target utama mereka.⁵⁶

Setelah NSC, Teori "peaceful rise" (Heping jueqi) atau "peaceful development" (Heping Fazhan) telah menjadi penggerak kebijakan luar negeri Cina sejak dipimpin oleh generasi keempatnya pada tahun 2003. Konsep ini digunakan sebagai upaya untuk melawan teori "china threat" dengan menekankan

⁵³ Anil Kumar, "New Security Concept"

⁵⁴ Teori evolusi damai dalam politik internasional mengacu pada dugaan untuk mempengaruhi transformasi politik dari sistem sosialis Cina dengan cara damai, terutama oleh Amerika Serikat. Menurut teori ini Amerika Serikat mempertahankan strategi untuk menyusup dan menumbangkan negara-negara sosialis, terutama Cina, dengan menyebarkan ide-ide politik dan gaya hidup Barat, menghasut ketidakpuasan, dan mendorong kelompok untuk menantang kepemimpinan Partai.

⁵⁵ Liberalisme borjuis merujuk pada sistem demokrasi parlementer dan budaya pop Barat.

⁵⁶ Anil Kumar, "New Security Concept"

cara-cara damai dalam usaha menempatkan China sebagai kekuatan dunia. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Zheng Bijian wakil presiden Central Party School dari Partai Komunis China (PKC) pada forum Boao untuk Asia di provinsi Hainan pada tahun 2003. Kemudian Presiden Hu Jintao juga menegaskan konsep baru ini beberapa kali - pertama pada peringatan Mao Zedong pada akhir Desember 2003 di Cina, kemudian selama kunjungan ke Paris pada Januari 2004, dan selama pertemuan rutin Politburo pada bulan Februari - telah memberi perhatian kepada media untuk pergeseran filosofi internasional Cina.⁵⁷

Tumbuhnya kekuatan ekonomi dan militer Cina disikapi dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Barat dengan "China Threat". Kebangkitan Cina menuju negara adidaya menyalip Amerika Serikat dianggap sebagai sebuah ancaman, sama seperti kisah pergantian kekuasaan pada era sebelumnya yang selalu berakibat perang. Tanpa penanganan masalah yang benar dari "China Threat" ini, Cina memahami bahwa kebangkitannya tidak akan diterima secara baik di komunitas internasional. Persepsi akan "China Threat" bisa merusak citra Beijing dan mengurangi efektivitas diplomasi Cina⁵⁸

Oleh karena itu mulai tahun 2002 para elit Cina diwakili oleh Zheng Bijian, mantan orang kepercayaan pemimpin Cina saat Hu Jintao, mulai mengembangkan dan menyebarluaskan konsep dan gagasan "peaceful rise" dalam upaya untuk mengatasi penyebab kecurigaan tentang kebangkitan Cina di Barat pada umumnya dan Amerika Serikat pada khususnya. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam berbagai perjalanan di Amerika Serikat, Zheng berusaha keras

⁵⁷ Yongnian Zheng dan Sow Keat Tok, "China's 'Peaceful Rise': Concept And Practice" Discussion Paper China Policy Institute Nottingham : UK (November 2005)

⁵⁸ Jianwei Wang, "China's Peaceful Rise: A Comparative Study" Seoul : The East Asia Institute, (Mei 2009) http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052017544710.pdf

untuk menegaskan bahwa Amerika membutuhkan kerangka konseptual baru untuk melihat kebangkitan Cina sebagai kekuatan dunia. Dia menyatakan bahwa Cina akan mengambil cara baru yang berupa "kebangkitan secara damai" dimana cara ini benar-benar berbeda dari kisah Jerman dan Jepang atau bekas Uni Soviet.⁵⁹

Peaceful rise ditandai dengan keterbukaan Cina dengan sistem ekonomi global. Keberhasilan metode ini bergantung pada seberapa besar pembangunan yang dilakukan Cina, keterbukaannya terhadap pasar, perbaikan kelembagaan, dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Cina telah berada di jalan pembangunan damai ini selama dua dekade dan mendapatkan banyak manfaat dari itu. Tidak ada alasan bagi Cina untuk mengubahnya.⁶⁰

Zheng kemudian mendefinisikan kebangkitan damai Cina setara dengan proses modernisasinya. Ketika Cina mulai menjadi negara industri pada tahun 1980an saat itu pulalah Cina tumbuh pertama kali menjadi negara besar. Zheng berpendapat bahwa pengalaman selama 25 tahun telah membuktikan jika proses Cina menjadi kekuatan besar tidak seperti naiknya kekuatan lain dalam sejarah. Proses pergantian kekuasaan selalu menggunakan cara-cara agresi dan perang untuk mengakomodasi naiknya sebuah negara. Cina dapat mengamankan segala modal yang diperlukan, teknologi dan sumber daya melalui cara-cara damai karena Cina telah membuka diri untuk pasar dunia. Pembangunan Cina membutuhkan lingkungan internasional yang damai sementara perkembangan Cina akan lebih memperkuat perdamaian dunia. Dengan demikian kebangkitan

⁵⁹ Wang, "China's Peaceful Rise"

⁶⁰ Wang, "China's Peaceful Rise"

damai Cina akan lebih banyak membawa peluang ketimbang ancaman kepada dunia internasional.⁶¹

Pada awal 1970-an, Cina memulai jalan yang sangat berbeda dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1979 Uni Soviet menginvasi Afghanistan sementara Partai Komunis Cina membuat keputusan bersejarah untuk mereformasi dan membuka diri terhadap dunia luar.⁶² Cina saat itu tidak memiliki keinginan untuk menantang tatanan internasional yang ada dan tidak akan pernah menganjurkan penggunaan kekerasan untuk menghancurkan sistem yang terbentuk. Menurut Zheng Bijian Cina tidak meninggalkan ekonomi globalisasi, tetapi malah mengikutinya. Hal ini dikarenakan globalisasi memungkinkan Cina untuk bertindak secara damai untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung modernisasi Cina. Dengan kata lain globalisasi memungkinkan Cina untuk mendapatkan kebutuhan sumber dayanya tanpa harus melakukan perluasan atau kolonisasi ke negara lain. Menurut Zheng lebih lanjut mengungkapkan bahwa di Cina berdirinya tiga konsep-konsep kunci dari kebijakan internal dan eksternal yaitu : perdamaian internasional, harmoni internal dan rekonsiliasi di seluruh selat Taiwan.⁶³

Selain *peaceful rise*, pada bulan Mei 2002 presiden Cina Jiang Zemin mengajukan gagasan "periode kesempatan strategis" (*zhongyao zhanlue jiyu qi*). Setengah tahun kemudian pada Kongres Partai ke-16 istilah ini kembali ditegaskan dalam intisari dokumen partai yaitu : "For our country, the first two decades of the twenty-first century are an important period of strategic

⁶¹Wang, "China's Peaceful Rise".

⁶²Wang, "China's Peaceful Rise"

⁶³Wang, "China's Peaceful Rise"

opportunities, which we must seize tightly and which offers bright prospects"⁶⁴

Dalam komentarnya di Universitas Harvard pada Desember 2003, Perdana Menteri Cina Wen Jiabao menegaskan bahwa "Perkembangan Cina diberkati dengan periode kesempatan strategis yang langka, dan ketika kesempatan tersebut tidak kita genggam maka kesempatan ini akan hilang"⁶⁵

Periode Kesempatan Strategis Cina atau dalam bahasa Inggris *China Period of Strategic Opportunities* mengacu pada durasi waktu dimana kekuatan nasional, daya saing internasional dan pengaruh negara diperkirakan akan meningkat secara konsisten sebagai akibat dari faktor-faktor subjektif dan objektif yang menguntungkan.⁶⁶ Setidaknya terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi untuk menilai apakah suatu negara dalam periode kesempatan strategis atau tidak.⁶⁷

Kondisi pertama, negara harus memiliki lingkungan yang kondusif untuk menciptakan potensi pengembangan yang kuat. Lingkungan yang dimaksud mencakup jaminan keamanan dan stabilitas negara, kemudian apakah faktor-faktor produksi yang ada dapat memberikan dukungan untuk pembangunan berkelanjutan, dan apakah lingkungan internal dan eksternal dapat memberikan kekuatan dan insentif yang cukup dan bagi pembangunan berkelanjutan.

Kedua, harus ada kompetensi dan kemauan untuk mengambil, memperluas atau bahkan membentuk peluang ketika kondisi yang menguntungkan muncul. Cina

⁶⁴ N.S. Sisodia dan V.Khrisnappa "Global Power Shift and Strategic Transition in Asia" *Academic Foundation* (September 1, 2009) 59

⁶⁵ Sisodia, Khrisnappa "Global Power" 59

⁶⁶ Xu Jian "Rethinking China's Period of Strategic Opportunity" *China Institute of International Studies*, China International Studies (March/April 2014) http://www.ciis.org.cn/english/2014-05/28/content_6942258.htm (diakses 10 November 2015)

⁶⁷ Xu Jian, "Rethinking China's"

telah gagal untuk menyadari bahwa Revolusi Industri adalah kesempatan besar bagi kemajuan manusia dan pembangunan nasional. Akibatnya, Cina telah tertinggal jauh di belakang negara-negara yang mengalami Revolusi Industri pada abad ke- 19 dan awal 20. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Cina sekali lagi menghadapi peluang pengembangan baru, namun karena kebijakan yang salah arah dari Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan, kesenjangan pembangunan antara Cina dan negara-negara lain sekali lagi tumbuh.⁶⁸

Ketiga, dalam periode waktu yang terbatas, suatu negara harus mampu melepaskan potensi pembangunan yang diharapkan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, sehingga perkembangannya bisa naik di atas tingkat rata-rata ekonomi dunia. Selama tiga kondisi ini muncul bersamaan, maka dapat dipertimbangkan apakah sebuah negara berada dalam periode kesempatan pembangunan atau tidak.

Para pemimpin Cina sendiri kemudian menganggap bahwa Cina telah mencapai kondisi strategis tersebut. Para pemimpin Cina sejak Deng Xiaoping telah menekankan untuk segera mengambil kesempatan strategis untuk perkembangan Cina setelah berakhirnya Perang Dingin. Hal ini merefleksikan penilaian keseluruhan Cina terhadap perubahan situasi dunia dan implikasinya bagi Cina, menegaskan kembali "peace and development" sebagai dua tema utama dan menggarisbawahi tujuan dasar Cina untuk dicapai pada awal abad ke-21 - peaceful rise (heping jueqi) atau peaceful development (heping fazhan).⁶⁹

Menurut N.S. Sisosodia dan V.Khrisnappa dalam bukunya *Global Power Shift and Strategic Transition in Asia* menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga

⁶⁸ Xu Jian, "Rethinking China's"

⁶⁹ Sisosodia, Khrisnappa "Global Power"⁵⁹

dasar kesempatan strategis bagi Cina. Pertama adalah kondisi geostrategis dunia di awal abad ke-21 pada dasarnya jinak dan menguntungkan bagi pertumbuhan Cina, terlepas dari segala ancaman yang ada. Kedua Cina yang pertama dan terpenting harus berkonsentrasi pada "kerjanya sendiri" - perkembangan sosial-ekonomi domestik dan pertumbuhan komprehensif kekuatan nasional. Yang ketiga Cina seharusnya secara aktif dan positif berpartisipasi dalam masalah-masalah regional dan global, dan berani namun tetap berhati-hati berusaha untuk menjadi lebih tegas dalam penciptaan aturan dan tatanan internasional⁷⁰

II.2 Kebijakan Luar Negeri Cina dalam Konflik Suriah

II.2.1 Veto Cina dalam Draft Resolusi DK PBB

Cina dalam konflik Suriah telah melakukan veto sebanyak empat kali. Veto pertama dikeluarkan dalam draft resolusi no. S/2011/612 tanggal 4 Oktober 2011. Draft ini diajukan oleh Prancis, Jerman, Portugal dan Inggris. Rancangan resolusi ini disetujui oleh 9 dari 15 anggota DK PBB. Dua veto diajukan oleh Cina dan Rusia sedangkan empat negara lainnya memilih abstain.

Rancangan resolusi ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terjadi di Suriah dan mengecam "kematian secara terus menerus dan pelanggaran HAM sistematis serta penggunaan kekerasan melawan warga sipil oleh pemerintah Suriah"⁷¹. Di dalam draft juga tertulis mendesak "semua pihak untuk menolak kekerasan dan ekstrimisme" dan menyerukan "suatu proses politik inklusif di Suriah yang dilakukan di lingkungan yang bebas dari kekerasan,

⁷⁰ Sisodia, Khrisnappa "Global Power"⁶⁰

⁷¹ "Russia and China veto draft Security Council resolution on Syria" UN News Centre <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39935>

ketakutan, intimidasi, dan ekstrimisme serta ditujukan secara efektif menangani aspirasi yang sah dan kepentingan penduduk Suriah”⁷²

Melalui draf tersebut pemerintah Suriah juga dituntut untuk 1) segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dan bekerja sama sepenuhnya dengan kantor Komisioner Tinggi HAM, 2) melaksanakan secara penuh HAM dan kebebasan mendasar bagi seluruh penduduk termasuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, membebaskan semua tahanan politik dan demonstran yang ditahan, dan mencabut pembatasan pada semua bentuk media 3) menghentikan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil, 4) meringankan situasi di daerah krisis dengan memungkinkan akses cepat bagi pemantau HAM yang diakui, pekerja dan lembaga kemanusiaan, dan memulihkan layanan dasar termasuk akses ke rumah sakit dan 5) memastikan keamanan orang-orang yang telah melarikan diri dari kekerasan untuk kembali ke rumah mereka.⁷³

Dalam draf juga diserukan kepada semua negara untuk “melatih kewaspadaan dan menahan pasokan langsung dan tidak langsung penjualan senjata ke Suriah dan material yang terkait seperti pelatihan teknis, sumber finansial, saran atau bantuan lain yang berkaitan dengan senjata dan peralatan terkait”⁷⁴. Dari draf tersebut dapat dilihat bahwa dunia internasional melalui DK PBB mendesak pemerintah Suriah untuk segera mengakhiri kekerasan dan pelanggaran HAM, dan mengancam untuk mengembargo pasokan senjata menuju Suriah. Duta besar Suriah Bashar Ja’afari mengatakan rancangan resolusi ini

⁷² "Russia and China veto draft Security Council"

⁷³ Draf resolusi DK PBB S/2011/612 dapat diakses
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/612

⁷⁴ Draf resolusi S/2011/612

mencerminkan upaya bias dari beberapa negara Barat untuk melemahkan otoritas negaranya. Bashar berpendapat bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat Suriah yang sah telah disalahgunakan oleh beberapa kelompok dalam negeri (dengan dukungan dari elemen asing) untuk memprovokasi intervensi eksternal.⁷⁵

Cina sendiri memveto draf resolusi ini karena menganggap bahwa rancangan tersebut hanya berfokus untuk menekan pemerintah Suriah dan bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi.⁷⁶ Sanksi atau ancaman dianggap tidak membantu untuk menyelesaikan masalah di Suriah dan sebaliknya membuat situasi menjadi lebih rumit. Lebih lanjut Cina melalui perwakilannya di PBB Li Baodong mengatakan bahwa Cina menyetujui proses politik secara inklusif namun Cina juga menegaskan bahwa ia sepenuhnya menghormati kedaulatan Suriah. Satu hal yang terus didukung Cina adalah penghormatan terhadap kedaulatan dan menyelesaikan krisis politik secara dialog.⁷⁷

Veto kedua dikeluarkan Cina pada draf resolusi DK PBB pada tanggal 4 Februari 2012. Draft ini diajukan oleh 20 negara yaitu Maroko, Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Portugal, Kolombia, Togo, Libya, Bahrain, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Tunisia, Oman dan Turki. Draft resolusi no. S/2012/77 ini menyatakan keprihatinan atas situasi yang memburuk dan juga kematian ribuan orang. Draft ini juga mengecam pelanggaran berat HAM dan semua kekerasan terlepas dari manapun asalnya. Pemerintah Suriah juga dituntut untuk melaksanakan "tanpa penundaan" unsur-unsur dari

⁷⁵ "Russia and China veto draft Security Council"

⁷⁶ "Russia and China veto draft Security Council"

⁷⁷ Notulensi Pertemuan sidang DK PBB tgl 4 Oktober 2011 dapat diakses di http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6627

rencana yang telah ditetapkan oleh Liga Arab pada tanggal 2 November 2011 dan keputusan tanggal 22 Januari 2012.⁷⁸

Rencana Liga Arab sebagaimana yang diuraikan dalam teks rancangan resolusi berisi tuntutan terhadap Suriah untuk segera menghentikan semua kekerasan dan melindungi penduduk sipil; membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang; menarik semua pasukan militer dan bersenjata dari kota dan desa; menjamin kebebasan untuk mengadakan demonstrasi secara damai; memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan di Suriah untuk semua anggota Liga Arab yang relevan dan juga media Arab dan internasional untuk menentukan kebenaran tentang situasi di lapangan dan memantau insiden yang berlangsung; serta memungkinkan akses penuh dan tanpa hambatan misi observasi Liga Arab.⁷⁹

Dalam draf tersebut juga mendukung penuh keputusan Liga Arab tanggal 22 Januari 2012 untuk memfasilitasi transisi politik Suriah yang mengedepankan demokrasi, sistem politik plural, di mana semua warga negara adalah sama terlepas dari afiliasi, etnis, atau keyakinan mereka, termasuk melalui dialog politik yang serius antara pemerintah Suriah dan seluruh oposisi Suriah di bawah naungan Liga Arab.⁸⁰

Menyikapi draf tersebut melalui Duta Besarnya Bashar Ja'afari, Suriah mengatakan akan mampu memenuhi rencana Liga Arab jika negara-negara Barat dan lainnya tidak memberikan "miliaran dolar" untuk kelompok-kelompok oposisi

⁷⁸ Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/77 dapat diakses
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77

⁷⁹ Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/77

⁸⁰ Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/77

bersenjata dan menaungi mereka untuk memfasilitasi serangan terhadap warga sipil Suriah.⁸¹

Cina sendiri secara diplomatis melalui perwakilannya Li Baodong masih tetap menyerukan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan di Suriah. Cina juga mendukung upaya Liga Arab untuk memulihkan stabilitas Suriah serta tetap menjunjung tinggi kedaulatan, kehormatan, dan integritas wilayah Suriah. Namun Li Baodong juga menyatakan bahwa dalam situasi saat ini, menempatkan "penekanan yang tidak semestinya" untuk menekan pemerintah Suriah tidak akan membantu menyelesaikan krisis, tapi akan menambah rumit situasi.⁸² Cina mengambil sikap untuk mendukung amandemen teks yang diusulkan oleh Federasi Rusia dan menganggap bahwa tekanan untuk menyetujui rancangan resolusi tidak akan mengatasi permasalahan ketika di dalam DK PBB sendiri masih belum mencapai kesepakatan (Rusia menolak rancangan draf). Li Baodong kemudian menekankan dan menambahkan bahwa hal ini adalah dalam konteks bahwa Cina telah menentang draf proposal.⁸³

Pada tanggal 19 Juli 2012 untuk ketiga kalinya Cina memveto draf resolusi DK PBB. Resolusi ini bertujuan untuk memperpanjang mandat Misi Pengawasan PBB di Suriah (UNSMIS) dan mengancam sanksi terhadap pemerintah Suriah jika tuntutan untuk mengakhiri kekerasan tidak dipenuhi.⁸⁴ Draf resolusi ini sendiri diajukan oleh Prancis, Jerman, Portugal, Britania Raya

⁸¹ "Syria: Ban voices deep regret after Security Council fails to agree on resolution", *UN News Centre*, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41144>

⁸² "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan" UN Press Release <http://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm>

⁸³ "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China "

⁸⁴ "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions"

dan juga Amerika Serikat. Sebelas suara mendukung draf dan dua negara melawan (Cina dan Rusia) dan 2 negara abstain (Pakistan dan Afrika Selatan).

Dalam draf tersebut tugas UNSMIS yang berakhir pada tanggal 20 Juli 2012 direncanakan akan diperpanjang selama 45 hari. Rancangan tersebut juga meminta Sekretaris Jenderal untuk mempertahankan kapasitas minimum pengamat militer dan komponen sipil yang diperlukan untuk mempromosikan langkah maju pada Rencana Enam Poin (Annan Six Point Plan) melalui fasilitasi dialog politik dan untuk melakukan tugas verifikasi fakta.⁸⁵ Selain itu melalui draf tersebut juga mengecam semua serangan terhadap UNSMIS dan menegaskan kembali bahwa pelaku serangan terhadap personil PBB harus dimintai pertanggungjawaban.

Draf ini juga menuntut pihak berwenang Suriah untuk memastikan operasi UNSMIS berjalan efektif; memfasilitasi penyebaran secara cepat dan tanpa hambatan seluruh personil agar dapat memenuhi mandatnya.⁸⁶ Lebih lanjut dalam draf tersebut memutuskan bahwa, jika pemerintah Suriah belum sepenuhnya memenuhi hal tersebut dalam waktu sepuluh hari maka akan segera memaksakan tindakan sesuai yang tertera dalam pasal 41 dari Piagam PBB.⁸⁷

Cina secara resmi melalui Li Baodong menyatakan keprihatinan atas meningkatnya kekerasan di Suriah dan mengecam keras pembunuhan warga sipil dan serangan bom di Damaskus. UNSMIS dianggap telah memberikan peran

⁸⁵ Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/538 (19 Juli 2012) dapat diakses http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/538

⁸⁶ Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/538

⁸⁷ Pasal 41 piagam PBB menegaskan bahwa Dewan Keamanan dapat memutuskan langkah-langkah yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang digunakan untuk memberi efek keputusan, dan mungkin memanggil para Anggota PBB untuk menerapkan langkah-langkah tersebut. Langkah yang diambil mungkin termasuk gangguan keseluruhan atau sebagian dari hubungan ekonomi dan rel, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/index.html>

penting dan oleh karena itu Cina mendukung usulan Sekretaris Jenderal untuk memperpanjang mandat UNSMIS. Namun, lebih lanjut menurut Li Baodong rancangan resolusi, bagaimanapun, adalah kontraproduktif, karena dianggap tidak seimbang dan menempatkan tekanan hanya pada satu pihak. Hal ini hanya akan menggagalkan penyelesaian konflik melalui jalur penyelesaian politik dan merusak perdamaian dan stabilitas regional.⁸⁸

Krisis menurut Baodong harus diselesaikan oleh Suriah sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyat Suriah, serta norma-norma dasar yang mencakup hubungan internasional. Diskusi yang berlangsung dalam draf resolusi ini membahayakan kesatuan Dewan Keamanan, karena negara yang mensponsori mengambil “pendekatan yang kaku dan sombong” dan menolak untuk melakukan revisi⁸⁹

Veto terakhir dalam kurun waktu dimulainya konflik Suriah sampe akhir 2014 dikeluarkan Cina pada draf resolusi no. S/2014/348. Draf ini diajukan oleh 65 negara termasuk di dalamnya 13 anggota DK PBB. Pemerintah Suriah dan milisi pro-pemerintah beserta kelompok bersenjata non-negara dikecam telah melakukan pelanggaran HAM dan hukum kemanusiaan internasional. Draf ini kemudian ingin mengajukan situasi di Suriah tersebut ke Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).⁹⁰ Resolusi ini jika disetujui akan memberikan mandat kepada Mahkamah untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan selama konflik di Suriah,

⁸⁸ “Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due to Negative Votes of China, Russian Federation” *UN Press Release*, <http://www.un.org/press/en/2012/sc10714.doc.htm>

⁸⁹ “Security Council Fails to Adopt”

⁹⁰ “Russia, China block Security Council referral of Syria to International Criminal Court” *UN News Centre*, <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47860>

yang sejak Maret 2011 menyebabkan korban kematian lebih dari 100.000 warga sipil, serta perpindahan jutaan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁹¹

Cina melalui perwakilannya di PBB Wang Min, kembali menegaskan untuk menentang semua tindakan kekerasan yang melanggar hukum humaniter internasional atau hak asasi manusia. Namun dalam rancangan resolusi Cina beranggapan bahwa setiap tindakan mencari rujukan ke Mahkamah Pidana Internasional harus didasarkan pada premis menghormati kedaulatan yudisial negara dan prinsip saling melengkapi.⁹² Walaupun upaya untuk mencari solusi politik mengalami kesulitan, Cina menekankan kepada masyarakat internasional untuk tetap sabar dan mendorong pemerintah Suriah dan oposisi untuk segera menyepakati gencatan senjata dan memulai putaran ketiga negosiasi.⁹³

II.2.2 Kebijakan Cina Mendukung Presiden Assad dan Mendukung Penyelesaian Konflik Secara Politik

Cina dalam konflik Suriah mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah secara politis. Otoritas beranggapan bahwa penyelesaian politik adalah satu-satunya cara yang realistis untuk keluar dari krisis Suriah.⁹⁴ Dalam berbagai pernyataan resminya Cina selalu menghimbau kepada pihak yang terkait dan masyarakat internasional untuk memberikan bantuan yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah Suriah dan sebisa mungkin untuk tidak mengambil tindakan intervensi militer apapun dalam konflik. Cina beranggapan bahwa tindakan militer sepihak oleh DK PBB akan memiliki dampak serius pada situasi

⁹¹ "Russia, China block Security Council"

⁹² "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" UN Press Release, <http://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm>

⁹³ "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes "

⁹⁴ "China's Position On Syria Issue" *Embassy PRC in Botswana*, <http://bw.chineseembassy.org/eng/xwdt/t1076201.htm> (diakses 10 November 2015)

Suriah dan kawasan Timur Tengah. Cina juga beranggapan bahwa tindakan intervensi militer merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Dukungan Cina terhadap Pemerintahan Assad

Meskipun Cina dalam pernyataan resminya selalu menekankan penyelesaian secara politik namun Cina juga tidak anti untuk memberi dukungan terhadap pemerintahan Assad. Hubungan baik antara Cina dengan Suriah telah terjalin baik sebelum dan selama jatuhnya pemberontakan di Suriah.

Ketika Uni Eropa menjatuhkan sanksi embargo pembelian minyak mentah kepada Suriah, Cina tidak mengikuti langkah Uni Eropa tersebut dan malah mengambil alih posisi Eropa untuk kontrol minyak mentah di wilayah Suriah. *China National Petroleum Corporation* (CNPC) adalah pemegang saham di dua perusahaan minyak terbesar di Suriah, dan telah menandatangani transaksi senilai miliaran dollar untuk bantuan penelitian dan pengembangan.⁹⁵ Perusahaan Cina lainnya Sincochem, memiliki saham dalam salah satu dari dua ladang minyak terbesar di Suriah.

Selain kerjasama baik yang telah terjalin dalam bidang jual beli minyak mentah, Cina (walaupun juga tidak dalam volume yang signifikan) telah bertransaksi untuk perdagangan senjata dengan pemerintah Suriah. Menjelang pecahnya pemberontakan di Suriah, Cina bersama dengan Korea Utara bertanggung jawab dalam 30 persen dari transaksi senjata yang ditandatangani dengan rezim Assad, sementara Rusia menyumbang 50 persennya.⁹⁶

⁹⁵ Yoram Evron, "Chinese Involvement"

⁹⁶ Thomas Grove dan Erika Solomon, "Russia Boosts Arms Sales to Syria Despite World Pressure," *Reuters*, (21 Februari 2012) <http://www.reuters.com/article/2012/02/21/us-syria-russia-arms-idUSTRE81K13420120221> (diakses 10 Desember 2015)

Beberapa hari setelah eskalasi muncul, utusan khusus Cina untuk Timur Tengah Wu Sike bertemu dengan wakil presiden Suriah Farouq Al-Shara di Damaskus. Dalam pertemuan tersebut Al-Shara mengatakan bahwa Suriah ingin untuk meningkatkan hubungan bilateral dan memperkuat hubungan dengan Cina di semua area.⁹⁷ Al-Shara menambahkan bahwa ia berharap Cina akan mengambil peran positif dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Utusan Cina Wu Sike kemudian membalas pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa "karena Suriah memiliki pengaruh luas baik di daerah regional maupun internasional, terutama pada proses perdamaian di Timur Tengah, Beijing berharap untuk mengembangkan dan mengencangkan hubungan dengan Suriah di berbagai bidang".⁹⁸

Dukungan Cina juga secara nyata tampak dalam sikapnya di DK PBB. Cina selalu menekankan bahwa solusi hanya bisa diwujudkan melalui dialog tidak dipaksakan dengan penggunaan kekuatan.⁹⁹ Menteri Luar Negeri Cina juga menegaskan bahwa Cina bertindak lebih hati-hati setelah Barat secara sepihak telah menggunakan resolusi Dewan Keamanan pada kasus Libya untuk meningkatkan serangan terhadap rezim Qaddafi.¹⁰⁰

Mediasi Cina terhadap pihak Oposisi

Cina membuka peluang bagi pihak oposisi untuk melakukan pembicaraan terkait penyelesaian konflik Suriah. Pada bulan Februari 2012, delegasi dari *Syrian National Committee for Democratic Change* melakukan kunjungan empat hari ke

⁹⁷ Yoram Evron, "Chinese Involvement"

⁹⁸ "Int'l Community Concerns over Syria Situation," *Xinhua*, (30 April 2011)
http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-04/30/c_13852874.htm (diakses 12 Desember 2015)

⁹⁹ "China: Political Dialogue Crucial to Return Normalcy in Syria," *Xinhua*, (29 April 2012)
http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-04/29/c_13851927.htm. (diakses 12 Desember 2015)

¹⁰⁰ Yoram Evron, "Chinese Involvement"

Beijing. *National Committe* sendiri merupakan satu dari dua kelompok oposisi terbesar di Suriah yang berbasis di Paris. Perwakilan delegasi oposisi Hassan Mana bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Zhai Jun dan beberapa perwakilan demokratik lainnya.¹⁰¹

Pada bulan Maret 2014, Ahmad Jarba Presiden Koalisi Nasional untuk Revolusi Suriah dan Pasukan Oposisi, tiba di Beijing untuk kunjungan empat hari. Jarba menemui Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Wakilnya Zhang Ming. Pembicaraan tersebut berfokus pada upaya untuk mencapai penyelesaian politik untuk konflik di Suriah. Para ahli dan peneliti di Cina juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan delegasi Jarba ini.

"Menerima delegasi dari Koalisi Nasional merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh Cina untuk bekerja pada semua pihak yang terkait dengan cara yang positif dan seimbang dan mendorong penyelesaian politik masalah Suriah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying dalam konferensi pers resmi. Hua mengatakan pemerintah Suriah dan oposisi harus mengambil langkah maju yang penting menuju penyelesaian politik di bawah kerangka Konferensi Jenewa 2 yang berlangsung di Swiss pada bulan Januari. Pada bulan September 2014 Cina juga menerima delegasi enam-anggota dari perwakilan oposisi Suriah, yang dipimpin oleh Berwin Ibrahim, sekretaris jenderal Partai Pemuda Nasional Suriah untuk Keadilan dan Pembangunan.

Usaha Cina menyelesaikan Konflik

Cina dalam konflik Suriah mengambil sikap resmi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Sikap aktif Cina untuk menyelesaikan konflik nampak

¹⁰¹ Kathrin Hille, "China Open Door to Syrian opposition," *Financial Times*, <http://www.ft.com/cms/s/0/20cc6a8c-5318-11e1-950d-00144feabdc0.html> (diakses 12 Desember 2015)

ketika Cina mengeluarkan publikasi independen untuk memecahkan krisis di Suriah. Sebagai langkah pertama Cina mengeluarkan pernyataan Enam Poin (Six Point Statement) pada bulan Maret 2012. Langkah ini merupakan langkah pertama Cina untuk bersikap independen dalam konflik Suriah setelah dalam beberapa penyelesaian sebelumnya selalu mengambil sikap yang sejalan dengan Rusia.¹⁰²

Melalui enam poin tersebut Cina menghimbau kepada pemerintah Suriah dan semua pihak yang terkait untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil ; menekan pemerintah dan berbagai faksi di Suriah segera melakukan dialog politik inklusif tanpa syarat melalui mediasi Gabungan Utusan Khusus PBB dan Liga Arab; mendukung upaya bantuan kemanusiaan dengan syarat tetap menghormati kedaulatan Suriah; mengharuskan pihak yang relevan dan masyarakat internasional untuk sungguh-sungguh menghormati kedaulatan Suriah dan hak rakyat Suriah untuk memilih sistem politik, tidak menyetujui campur tangan bersenjata atau mendorong perubahan rezim di Suriah; menyambut baik penunjukan Utusan Khusus Bersama untuk krisis Suriah oleh PBB dan Liga Arab; serta menghimbau anggota Dewan Keamanan secara ketat mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.¹⁰³

Setelah publikasi pernyataan enam poin tersebut Cina kembali mengeluarkan sikap resmi pada Oktober 2012. Cina mengkonversi pernyataan enam poin tersebut ke dalam sebuah inisiatif resmi: rencana empat poin (Four

¹⁰² Di DK PBB Cina bersama dengan Rusia secara bersamaan memveto draf resolusi yang isinya menekan pemerintahan Assad. Selain itu penyelesaian konflik sebelumnya Cina tidak bersikap benar-benar independen ex: atas nama PBB atau organisasi lain.

¹⁰³ "China's Peace Plan for Syria," *Voice of America*, <http://www.voanews.com/content/chinas-peace-plan-for-syria--141724603/181232.html> (diakses 12 Desember 2015)

Point Plan) untuk menyelesaikan krisis. Sebagai tahap pertama, pihak yang terlibat dalam konflik dipanggil untuk bersama-sama menghentikan kekerasan. Pada tahap berikutnya, mereka harus menyusun *roadmap* untuk proses transisi politik di Suriah, sementara Rezim Assad akan 'tetap di tempat' untuk memastikan stabilitas politik sampai pembicaraan selesai. Pada tahap ketiga, masyarakat internasional akan bekerjasama dengan perwakilan khusus bersama PBB-Liga Arab untuk Suriah (UN-Arab League Joint Special Representative for Syria) untuk melaksanakan resolusi internasional yang telah ditetapkan dibawah naungan PBB dan Dewan Keamanan. Pada tahap keempat, masyarakat internasional akan dilibatkan untuk memperkuat upaya memecahkan masalah kemanusiaan yang disebabkan oleh krisis, bantuan kemanusiaan akan diberikan tanpa politisasi atau militerisasi.¹⁰⁴

Menurut rencana, mediator PBB-Liga Arab akan memainkan peran yang dominan pada semua tahap dengan mengikuti semua bentuk pembicaraan untuk menyelesaikan masalah, dan di saat yang bersamaan menerima dukungan dan bantuan dari negara-negara di wilayah tersebut dan juga dari negara-negara besar. Dengan kata lain, rencana tersebut sepenuhnya mengenyampingkan intervensi internasional unilateral dan juga menolak tekanan dan penghapusan rezim Assad dengan cara kekerasan.¹⁰⁵

Cina dan Kelompok Pemberontak Islamis

Pemberontakan bersenjata telah berkembang secara signifikan. Kelompok moderat sekuler kemudian tidak lagi menjadi oposisi utama tetapi muncul juga

¹⁰⁴ Yoram Evron, "Chinese Involvement"

¹⁰⁵ "China Presents a Four-Point Proposal for Resolving the Civil War in Syria," *New York Times*, (1 November 2012), http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/middleeast/syria.html?_r=1&. (diakses 12 Desember 2015)

kelompok dengan Islamis dan jihadis. Dengan memanfaatkan kekacauan di wilayah Suriah, Negara Islam (ISIS) - kelompok ekstremis yang tumbuh dari al-Qaeda di Irak - telah menguasai banyak wilayah di sebagian besar utara dan timur Suriah, serta negara tetangga Irak.¹⁰⁶ Namun pergerakan dari ISIS sendiri terpisah dari Al-Qaeda. Dalam konflik Suriah kelompok yang berafiliasi langsung dengan Al-Qaeda adalah Jabhat Al-Nusra.

Posisi Cina sendiri dalam menghadapi kelompok ekstremis (tidak hanya di Suriah) telah ditunjukkan melalui Shanghai Cooperation Organizations. Dalam sebuah pertemuan di SCO pada tahun 2014 para anggotanya melihat ancaman yang sama dengan Eropa dan Amerika dalam memandang ISIS. Para anggota dari SCO termasuk Cina memiliki sebagian warga mereka yang telah bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah. Menurut Wu Sike pada bulan Juli 2014, utusan khusus Cina untuk Timur Tengah, setidaknya terdapat 100 warga Cina yang berjuang untuk IS.¹⁰⁷ Menurut Wu pejuang ISIS tersebut berasal dari warga Uighur di bagian Xinjiang Cina.

Dalam menyikapi aksi ekstrimisme Presiden Xi Jinping dalam pertemuannya dengan kepala negara SCO menegaskan "(Kami) harus membuat upaya bersama untuk menindak 'tiga kekuatan jahat' terorisme, ekstremisme dan separatisme."¹⁰⁸ Zhang Xinfeng, direktur kelompok Daerah Badan Anti-Terorisme juga berbicara tentang kekhawatiran kembalinya para anggota ISIS. Ia

¹⁰⁶ "Syria : The Story of the Conflict" BBC, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> (diakses 12 Desember 2015)

¹⁰⁷"China and ISIS threat," *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2014/09/china-and-the-isis-threat/> (diakses 12 Desember 2015)

¹⁰⁸ "China and ISIS threat"

mengatakan "Orang-orang ini sudah mulai kembali ke tanah air mereka, yang merupakan ancaman besar bagi keamanan regional."¹⁰⁹



¹⁰⁹ China and ISIS threat"

BAB III

KEPENTINGAN CINA DI KONFLIK SURIAH

III.1 Kepentingan Ekonomi Cina Di Timur Tengah

Kepentingan utama Cina di Timur Tengah (dan termasuk Afrika Utara) adalah untuk memenuhi kebutuhan potensial akan energi.¹¹⁰¹¹¹ Pertumbuhan ekonomi pesat Cina didukung oleh sumber daya energi yang melimpah dan ekspor barang dagangan. Namun pengembangan industri energi dalam negeri Cina sendiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan ekonomi. Terhitung sejak tahun 1993 Cina yang sebelumnya memainkan peran sebagai negara eksportir sumber daya alam, terutama minyak berubah menjadi negara importir. Saat itu Cina memulai kebijakan "go out" nya (*zhouchuqu*) untuk memberi makan pertumbuhan ekonomi.¹¹² Saat ini sekitar setengah dari konsumsi sumber daya alam Cina dipenuhi melalui impor. Lebih lanjut, setengah dari minyak mentah yang diimpor berasal dari Timur Tengah menjadikannya sebagai pengeksport tertinggi minyak mentah ke Cina. Untuk itu Cina akan semakin membutuhkan pasokan minyak dari luar negeri khususnya dari kawasan MENA.

Selain untuk memenuhi kebutuhan energi, kawasan Timur Tengah juga merupakan kawasan logistik strategis dan hubungan perdagangan untuk barang ekspor Cina serta akses pasar menuju Eropa dan Afrika.¹¹³ Uni Eropa saat ini

¹¹⁰ Yan Xue Tong hal.75

¹¹¹ Cristina Lin, "China's Strategic Shift Toward The Region Of The Four Seas: The Middle Kingdom Arrives In The Middle East" *Middle East Review of International Affairs*, 17:1 (2013) 32.
http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/163381/ipublicationdocument_singledocument/660d7c24-8bed-44a0-b6cf-a6038ece03e2/en/226_Lin.pdf

¹¹² Lin, "China's Strategic Shift"

¹¹³ Lin, "China's Strategic Shift," 32

menjadi mitra dagang terbesar Cina diatas Amerika Serikat.¹¹⁴ Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan besar di benua Afrika - baik melalui proyek-proyek infrastruktur dan juga kontrak pasokan energi jangka panjang.¹¹⁵ Lebih dari 1 juta orang Cina tinggal di Afrika (naik dari sekitar 100.000 pada awal 2000-an), dengan nilai perdagangan sebesar \$ 120 miliar pada tahun 2011.¹¹⁶ Pada tahun 2009, Cina melampaui Amerika Serikat untuk menjadi partner perdagangan utama Afrika.¹¹⁷ Dengan demikian, Timur Tengah merupakan wilayah strategis yang menghubungkan pasar Eropa, Afrika, dan Asia.

Oleh karena itu mengingat lokasi Timur Tengah sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan tiga benua, daerah penting untuk akses pasar, dan lokasi cadangan energi melimpah untuk memenuhi bahan bakar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Cina, pemerintahan Cina menganggap Timur Tengah sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan luar negerinya.¹¹⁸

III.1.1 Keamanan Energi Cina di Timur Tengah

Keterlibatan Cina di pasar energi global telah meningkat secara dramatis dalam satu dekade terakhir, menyumbang sekitar 60 persen dari pertumbuhan permintaan energi global antara 2003 sampai 2013.¹¹⁹ Didorong oleh tingkat pertumbuhan PDB rata-rata tahunan melebihi 10 persen pada periode yang sama, permintaan minyak Cina meningkat rata-rata 450.000 barel per hari di setiap

¹¹⁴ Statistical Communique on the 2011 National Economic and Social Development, *National Bureau of Statistics of China*, http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomi ngevents/t20120222_402786587.htm (diakses 4 November 2014)

¹¹⁵ Lin, "China's Strategic Shift,"

¹¹⁶ Jacob Zenn, "Chinese, Overseas and Insecure," *Asia Times*, 6 September 2012

¹¹⁷ Brendan O'Reilly, "China's Winning Strategy in Africa," *Asia Times Online*, 15 Agustus 2012

¹¹⁸ Lin, "China's Strategic Shift," 32

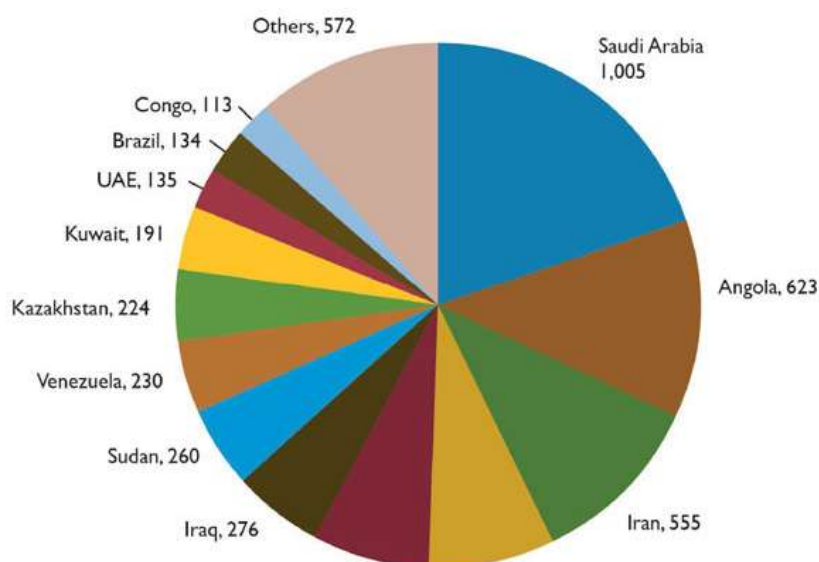
¹¹⁹ Zha Daojiong dan Michal Meidan, "China and the Middle East in a New Energy Landscape" (Research Paper, Asia Programme, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs Oktober 2015), hal.2

tahun. Pada 2014 China mengkonsumsi 10,4 juta barel per hari, naik dari 6,4 juta barel per hari pada tahun 2004.¹²⁰

Untuk memenuhi kebutuhan sumber dayanya Cina mencari sumber energi alternatif di berbagai belahan dunia seperti di Asia Tengah. Namun ketergantungan Cina terhadap minyak dari Timur Tengah juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Timur Tengah saat ini merupakan eksportir terbesar minyak mentah ke Cina (lihat Gambar dibawah).

Tabel III.1 Impor Minyak Mentah Cina tahun 2011

thousand barrels per day



Source: FACTS Global Enerav

Sumber : <http://www.worldfinancialreview.com/?p=3177>

Pangsa impor minyak Cina dari Timur Tengah terus meningkat dari tahun 1990 sampao 2011. Pada tahun 1990 pangsa impor minyak Cina dari Timur Tengah sebesar 48%, kemudian meningkat menjadi 49% pada tahun 2005, dan 51% pada tahun 2011. Menurut International Energy Agency mengekspektasikan

¹²⁰ Zha Daojiong, Michal Meidan "China and the Middle East" 2

bahwa impor minyak mentah Cina dari Timur Tengah akan mencapai angka 70% pada tahun 2020 dan terus berkembang sampai 2035.¹²¹ Arab Saudi adalah pemasok energi terbesar Cina dengan jumlah ekspor minyak sekitar satu juta barel per hari, menyumbang 20 persen dari total impor minyak mentah Cina. Tidak jauh di belakang adalah Angola, dan di peringkat ketiga terdapat negara penting di Timur Tengah yaitu Iran, yang memberikan kontribusi sekitar 10% dari total impor minyak China secara keseluruhan. Namun, perlu ditunjukkan bahwa sanksi PBB terhadap Iran mengakibatkan ekspor minyak ke Cina turun 74% pada tahun 2009-2010, turun sebesar 16 persen dari impor minyak Cina keseluruhan pada tahun 2009. Sanksi PBB juga mengakibatkan posisi Iran turun dari peringkat kedua pemasok minyak terbesar untuk Cina¹²²

Dengan ekonomi Cina yang terus tumbuh, impor minyak juga mengalami kenaikan drastis dari \$ 664juta pada tahun 1980 menjadi \$ 235,7miliar pada tahun 2011, menjadikan Cina sebagai importir minyak terbesar dunia.¹²³ Menurut sebuah laporan tahun 2013 oleh Wood Mackenzie, sebuah perusahaan konsultan, Cina akan menghabiskan sekitar \$ 500milliar untuk impor minyak mentah pada tahun 2020, dari jumlah tersebut pangsa impor Cina dari OPEC juga akan meningkat dari 52persen pada tahun 2005 menjadi 66 persen pada tahun 2020.¹²⁴ Cina juga telah menyalip Amerika Serikat dalam negara pengimpor minyak terbesar dari OPEC pada tahun 2013.

¹²¹ Abbās Varij Kāzemi dan Xiangming Chen, "China and the Middle East: More Than Oil" *World Financial Review* <http://www.worldfinancialreview.com/?p=3177> (diakses 2 Desember 2015)

¹²² Tom Pember-Finn, "China and the Middle East: The Emerging Energy Nexus", *China and the Middle East*, (2011) www.stanford.edu/group/sjeaa/journal111/China4.pdf

¹²³ Ted.C.Liu, "China's economic engagement in the Middle East and North Africa" *Policy Brief* 173 (Januari 2014)

http://fride.org/download/PB_173_China_economic_engagement_in_MENA.pdf

¹²⁴ Ted.C.Liu, "China's economic engagement"

Jumlah impor minyak dan gas Cina dari wilayah MENA terus meningkat, sementara itu Amerika sebagai negara pengimpor terbesar sebelumnya menjadi lebih mandiri karena adanya alternatif eksploitasi minyak dan gas. Negara-negara Uni Eropa juga mengalami penurunan impor minyak mentah dari wilayah MENA. Pada tahun 2005 tercatat impor minyak mentah Uni Eropa dari wilayah ini menyumbang sebesar 21,59 persen dari impor keseluruhan kemudian menurun menjadi 19,47 persen dari total tahun 2011, beralih ke negara pecahan Uni Soviet yang meningkat dari 38,40 persen menjadi 43,33 persen dalam jangka waktu yang sama.¹²⁵ Hal ini menjadikan Cina sebagai mitra perdagangan energi yang signifikan bagi Timur Tengah dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai contoh meningkatnya hubungan ekonomi Cina ke negara-negara di Timur Tengah menggantikan Barat nampak pada kasus Irak. Cina terus memperkuat investasi di sektor energi Irak menjadikannya mitra penting selain Amerika dan Eropa. Ketika banyak perusahaan Barat terdorong untuk meninggalkan Irak seiring dengan adanya konflik sektarian, perusahaan minyak Cina malah masuk untuk mengambil keuntungan dari sumber daya minyak di wilayah ini. Dengan dukungan utama dari negara, perusahaan Cina telah menjadi pemain tunggal terbesar dalam industri energi Irak.¹²⁶

Dengan negara dukungan, perusahaan China lebih berisiko-toleran dan telah kolektif membuat Cina terbesar pemain tunggal dalam industri energi Irak. Laporan dari New York Times melaporkan bahwa Cina membeli hampir setengah dari total 1,5 juta barel minyak yang diproduksi Irak perhari. Perusahaan nasional

¹²⁵ Liu, "China's economic engagement"

¹²⁶ Liu, "China's economic engagement"

Cina sekarang memiliki sejumlah besar saham di ladang minyak al-Ahdad, Halfaya dan Rumaila. Untuk membina hubungan yang lebih erat dengan Baghdad, Beijing menghapuskan sekitar 80 persen dari \$ 8,5 miliar utang Irak ke China pada tahun 2010 dan telah menandatangani transaksi perdagangan bernilai miliaran dolar, termasuk di industri berat, pemerintah, pariwisata dan sektor transportasi.¹²⁷

Mengingat pentingnya wilayah Timur Tengah bagi kebutuhan energi nasional, Cina kemudian berusaha untuk mempertahankan hubungan persahabatan dengan semua negara di wilayah ini khususnya dengan Arab Saudi dan Iran. Sejumlah pemimpin Cina termasuk Hu Jintao dan Presiden saat ini Xi Jinping telah mengunjungi Arab Saudi. Cina juga telah menolak sanksi PBB terhadap Iran. Bentuk diplomatik Cina terhadap Timur Tengah ini sesuai dengan kebijakan ekonomi pragmatis Cina dan kepentingan energi di daerah yang kaya komoditas.¹²⁸

III.1.2 Hubungan Ekonomi Cina dengan Timur Tengah

Selain ketergantungan minyak Cina yang terus meningkat, Cina juga terus memperluas hubungan ekonominya dengan Timur Tengah melalui perdagangan. Dari tahun 2005 sampai 2009, menurut statistik resmi Cina, total volume perdagangan China dengan Timur Tengah naik 87%, dari \$ 100 miliar mencapai sekitar \$ 222 miliar pada tahun 2012.¹²⁹ Angka tersebut mendorong Cina melampaui Amerika Serikat sebagai tujuan utama ekspor di Timur Tengah pada tahun 2010. Ditinjau dari Cina sendiri menurut Bo Zhiyue, ahli dari National

¹²⁷ Liu, "China's economic engagement"

¹²⁸ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹²⁹ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

University of Singapore, Timur Tengah akan menjadi mitra dagang keempat atau kelima terbesar Cina.¹³⁰

Ekspor Cina ke Timur Tengah mayoritas merupakan barang-barang murah rumah tangga. Sebagai contoh adalah tumbuhnya jumlah warga Mesir yang membeli mobil murah buatan Cina. Kemudian, di penduduk di Jalur Gaza dimana terdapat blokade wilayah oleh Israel semakin tergantung pada barang-barang murah dari Cina untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹³¹

Hal yang sama juga terjadi di Iran. Secara historis hubungan ekonomi Iran dengan Cina dikuasai oleh perdagangan minyak dan gas. Namun, sanksi internasional terhadap Iran telah mengubah hubungan perdagangan Cina-Iran. Barang-barang murah dari Cina telah memenuhi pasar di Iran dan lebih mudah diakses konsumen daripada barang-barang Eropa. Sebelumnya Jerman, Italia dan Yunani adalah mitra dagang utama Iran. Saat ini, Cina adalah tujuan utama bagi ekspor Iran sementara impor Cina ke Iran merupakan nomor dua setelah UEA.¹³² Menurut Massachusetts Institute of Teknologi (MIT), minyak merupakan komoditas utama ekspor Iran ke Cina sementara impor Iran dari Cina sebagian besar berupa mobil, peralatan industri, dan barang konsumsi. Kerjasama juga terjadi dalam proyek infrastruktur dimana perusahaan Cina memenangkan kontrak infrastruktur seperti sistem Metro Teheran dan proyek perluasan tol Sadr.¹³³

Perluasan ekonomi Cina di Timur Tengah kemudian banyak disalurkan melalui Dubai karena letaknya yang strategis diantara Eropa dan Asia serta

¹³⁰ Liu, "China's economic engagement"

¹³¹ James Chen, 'The Emergence of China in the Middle East', *Strategic Forum*, National Defense University, (Desember 2011).

¹³² Liu, "China's economic engagement"

¹³³ Liu, "China's economic engagement"

perannya sebagai negara keuangan global, pusat perdagangan dan logistik.¹³⁴ Total perdagangan Cina-UEA diperkirakan meningkat dari \$ 21 miliar pada 2009 menjadi lebih dari \$ 40 miliar pada tahun 2013, dan hampir \$ 100 miliar pada 2015. Menurut Dubai International Finance Centre (DIFC), sekitar 2.300 perusahaan China telah terdaftar di Dubai pada Desember 2011.

Sekitar 200.000 warga negara Cina, terutama ekspatriat bisnis, tinggal di Dubai. Sekitar 70% dari ekspor Cina ke UEA diekspor kembali dari Dubai ke tujuan terdekat seperti Iran dan Arab Saudi¹³⁵, hal ini menjadikan Dubai sebagai pusat distribusi barang di Timur Tengah. The Jebel Ali Free Zone (Jafza) di Dubai telah menjadi tempat bagi lebih dari 170 perusahaan besar Cina. Perdagangan Jafza-Cina bernilai sebesar \$ 11 miliar pada tahun 2012, menyumbang sekitar 14% dari total \$ 82 milyar perdagangan di zona tersebut.¹³⁶ Dubai juga membangun Chinatown, proyek seluas 800 hektar di dekat Bandara Internasional Dubai dengan biaya \$ 47 juta. Ketika selesai pembangunan ini diharapkan untuk mengakomodasi 60.000 orang dan akan menjadi Chinatown terbesar di dunia.¹³⁷ Mesir juga menjadi pasar yang baik bagi produk-produk Cina. Jumlah penduduk Mesir yang besar memberikan keuntungan bagi Cina untuk menjual produk murah. Ekspor Cina ke Mesir pada tahun 2011 telah melampaui Amerika Serikat.¹³⁸ Hubungan baik antara Cina dan Mesir juga memfasilitasi manfaat praktis seperti mempercepat akses ke Terusan Suez untuk lewatnya kapal

¹³⁴ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹³⁵ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹³⁶ Radio Zamaneh, 'China Looking To Increase Oil Imports From Iran', *Eurasian Review*, (1 Januari, 2011) http://www.eurasiareview.com/01012014-china-looking-increaseoil-importsiran/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29.

¹³⁷ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹³⁸ Liu, "China's economic engagement"

komersial dan kapal perang Cina. Upaya mengembangkan hubungan bilateral dengan Morsi diusahakan Cina melalui Francophone.¹³⁹

Investasi Cina di Timur Tengah kemudian secara garis besar telah tumbuh sepuluh kali lipat dari \$ 1 miliar pada tahun 2005 menjadi \$ 11 miliar pada tahun 2009.¹⁴⁰ Menurut peta investasi global Cina¹⁴¹, investasi kumulatif di Iran sepanjang tahun 2005-2012 diperkirakan sebesar \$ 18,6 miliar, termasuk di dalamnya \$ 13,9 miliar di sektor energi, \$ 2,1 miliar di sektor transportasi, dan \$ 2,8 miliar dari perdagangan metal. Cina juga berinvestasi sekitar \$ 13,6 miliar di Arab Saudi, dengan \$ 5,2 miliar logam, \$ 3,3 miliar energi, \$ 2,2 miliar real estate, dan sisanya dalam transportasi dan berbagai sektor lainnya.¹⁴² Di Turki, investasi Cina mayoritas di sektor energi sebesar \$ 4,3 miliar dari total investasi \$ 6,4 miliar.¹⁴³

Cina kemudian juga menjadi investor asing terbesar di Irak dan Iran. Berbagai proyek infrastruktur besar di Timur Tengah dikerjakan oleh kontraktor dari Cina. Mesir juga telah berhubungan dengan Cina untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Suez. Secara garis besar investasi Cina di Timur Tengah masih terpusat pada sektor energy

¹³⁹ Liu, "China's economic engagement"

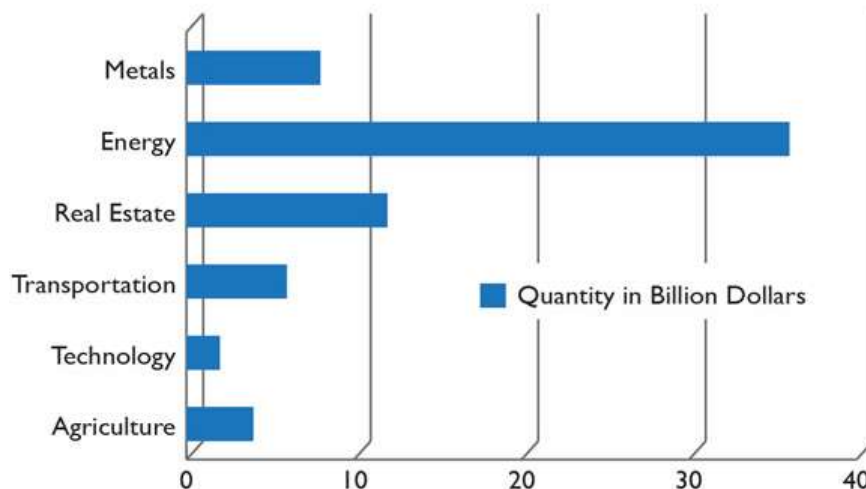
¹⁴⁰ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹⁴¹ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹⁴² Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

¹⁴³ Kāzemi dan Chen, "China and the Middle East"

Tabel III.2 Investasi Cina di Timur Tengah



Source: Compiled and graphed from the source in Note 7; see <http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-tracker-interactive-map>

III.2 Kepentingan Keamanan Cina : Menjaga agar Gerakan Teorisme, Ekstrimisme, dan Separatis tidak berkembang ke Xinjiang

III.2.1 Arti Penting Kawasan Xinjiang bagi Cina

Xinjiang merupakan kawasan strategis bagi Cina karena berbagai alasan. Pertama, Xinjiang memiliki cadangan alam yang besar.¹⁴⁴ Wilayah ini memiliki 122 jenis mineral yang tersebar dalam 4000 situs yang berbeda, menyumbang sekitar 78 persen dari seluruh mineral yang ada di Cina. Xinjiang juga merupakan pemasok terbesar berilium, talc, cubic niter, feldspar, dan tanah yang digunakan untuk membuat tembikar dan porselen. Cadangan batubara di Xinjiang mencapai 1600 milyar ton yang merupakan sepertiga dari total cadangan Cina. Xinjiang juga memiliki sumber daya minyak dan gas yang melimpah di wilayah Tarim, Junggar, Turpan, dan cekungan Hami. Perkiraan jumlah cadangan minyak

¹⁴⁴ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia: China's Problems and Policy Implications Damodar" *Indian Journal of Asian Affairs*, 19: 2, (Desember 2006), 29-44

mencapai 30 sampai 50 milyar ton dan gas alam sebesar 1309 milyar kubik meter¹⁴⁵.

Dari semua daerah yang memproduksi sumber daya alam, wilayah cekungan Tarim secara khusus memiliki sumber daya energi yang paling berlimpah.¹⁴⁶ Menurut statistik terbaru, Tarim memiliki cadangan minyak dan gas alam masing-masing mencapai 6 miliar ton dan 8 triliun meter kubik. Dari jumlah tersebut, sejauh ini kurang lebih 10 persen cadangan yang baru ditemukan.¹⁴⁷ Sumber daya ini tentu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Cina. Mengingat kebijakan 'open door' Cina, Xinjiang berfungsi sebagai pemasok bahan baku ke wilayah pesisir (timur ex: Shanghai, Beijing) untuk digunakan dalam proses industrialisasi.

Cina kemudian telah memulai proyek ambisius pipa gas sepanjang 4200km yang menghubungkan barat dengan timur. Pipa ini akan membawa gas alam dari cekungan Tarim di Xinjiang menuju provinsi Shanghai dan Zhejiang¹⁴⁸. Selain itu, Xinjiang juga memiliki potensi besar pada sektor pertanian. Wilayah ini memiliki lebih banyak lahan subur jika dibandingkan dengan daerah dan provinsi lain di Cina. Sekitar 3.1 juta hektar wilayahnya merupakan lahan pertanian. Selain lahan pertanian yang sudah tergarap, Xinjiang juga memiliki potensi lahan pertanian sebesar 4,9 juta hektar. Wilayah ini juga terkenal untuk kualitas kuda dan domba. Pada tahun 2003 produksi kapas mencapai 1,6 juta ton yang merupakan sepertiga dari total produksi China. Salah satu produk terkenal

¹⁴⁵ "New Scenes at the Ancient Silk Road", (Beijing: New Star Publishers, 1995)

¹⁴⁶ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

¹⁴⁷ Feng Jing, "Tarim to Fuel China," *Beijing Review*, (9 October 2003,) 28.

¹⁴⁸ Feng Jing "Piping in Clean Energy," *Beijing Review*, (9 Oktober 2003,) 29.

dari Xinjiang adalah ekspor saus tomat yang menyumbang 25 persen dari total volume dunia.¹⁴⁹

Selain sumber daya Xinjiang secara geografis berada pada posisi strategis. Lokasi geografisnya memberikan keuntungan besar ke Cina dari sudut pandang geopolitik.¹⁵⁰ Wilayah Xinjiang berbatasan dengan delapan negara. Hal ini menyediakan kesempatan bagi Cina untuk menjalin hubungan perdagangan dan ekonomi dengan negara-negara tersebut sehingga menyediakan kesempatan besar bagi Cina untuk meningkatkan ekonominya.

Wilayah Xinjiang telah menghubungkan Cina ke perbatasan Timur Tengah yang kaya akan minyak. Selain itu Xinjiang juga berfungsi sebagai penyangga keamanan (*buffer zone*) yang tepat untuk Cina. Dilihat secara historis wilayah Xinjiang kerap kali melindungi Cina dari invasi Asia Tengah.¹⁵¹

Dengan wilayah yang mayoritas tidak berpenduduk, Xinjiang menyediakan tempat yang aman bagi Cina untuk melakukan manuver militer dan uji coba nuklir. Lop Nor, situs pengujian nuklir Cina terletak di wilayah ini. Elit berkuasa di Cina memandang kontrol mereka atas Xinjiang berfungsi sebagai penegasan kedaulatan.¹⁵²

Menurut Damodar Panda¹⁵³, Xinjiang juga menyediakan koridor bagi Cina untuk menegaskan pengaruhnya di Asia Tengah, wilayah strategis penting. Asia Tengah berbatasan tidak hanya dengan Cina tetapi juga negara-negara seperti Rusia, Turki, Iran, Afghanistan. Asia Tengah juga memiliki hubungan penting

¹⁴⁹ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

¹⁵⁰ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

¹⁵¹ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

¹⁵² Lillian Craig, "Xinjiang, Central Asia and the Implications for China's Policy in the Islamic World," *China Quarterly*, (Maret 1993,) 111-129.

¹⁵³ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

dengan India dan Pakistan. Amerika Serikat sendiri memandang Asia Tengah wilayah penting sebagai penghubung Eurasia.

Sejak Asia Tengah menjadi bagian dari dunia Muslim, mayoritas penduduknya adalah penganut Islam. Negara-negara seperti Cina, yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan di Asia Tengah, percaya bahwa mendapatkan kedudukan di wilayah ini akan membantu untuk mendapatkan pengaruh tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga seluruh dunia Islam.¹⁵⁴

Selain itu, Asia Tengah memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah. Banyak negara-negara besar ingin mengeksplorasi dan mengeksploitasinya untuk kepentingan ekonomi. Cina sendiri dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan membutuhkan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan untuk pengembangan ekonominya. Cadangan minyak dan gas China terhitung kecil jika dibandingkan dengan potensi permintaan domestik di masa mendatang. Estimasi cadangan minyak Cina berada di kisaran 20-30 miliar barel, memberikan cadangan atau rasio produksi sampai sekitar 20 tahun.¹⁵⁵ Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Cina dapat memenuhinya dari negara-negara Asia Tengah, Kazakhstan khususnya.

Xinjiang juga penting karena digunakan sebagai jalur utama yang dilewati oleh *Silk Road*. Selama era dinasti Han dan Dinasti Tang, Xinjiang berfungsi tidak hanya sebagai penghubung untuk lewatnya barang-barang tetapi juga untuk transmisi pengetahuan dan ide-ide antara Timur dan Barat. Jalur ini merupakan satu-satunya jalur bagi Cina untuk berhubungan dengan Barat antara abad 2 SM sampai abad ke-10 Masehi. Penemuan rute laut dari Eropa ke Asia pada akhir

¹⁵⁴ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

¹⁵⁵ Damodar Panda, "Xinjiang and Central Asia"

abad ke-15 merupakan kemunduran dari Jalur Sutra. Arus barang dan ide tidak lagi melewati darat tetapi laut.

Namun Cina akhir-akhir ini mulai menghidupkan kembali jalan ini tidak hanya untuk perdagangan tetapi juga untuk pariwisata. Ada lebih dari 236 peninggalan budaya kuno termasuk pekuburan dan makam, arsitektur, gua-gua, prasasti batu dan beacon. Turki, Iran dan Republik Asia Tengah juga tertarik dalam kebangkitan *Silk Road*. Mereka menandatangani perjanjian pada KTT Ashkhabad Mei 1992 untuk menghidupkan kembali Jalur Sutra dengan membangun jalan raya dari Turki ke bagian Barat Cina dan menyelesaikan jalur kereta api antara Teluk Persia dan Xinjiang. Bagian dari Jalur Sutra Cina dari Lianyungang di Provinsi Jiangsu menuju Helgus di Xinjiang telah selesai. Hal ini juga akan mempercepat pembangunan koridor transportasi Eurasia.

Konsep pembangunan *New Silk Road "One Belt, One Road"* yang direncanakan oleh Xi Jinping sejak akhir 2013 juga menambah penting kawasan ini bagi Cina. Dengan konsep tersebut Xi Jinping berharap untuk mengangkat nilai perdagangan sebesar \$ 2,5 triliun dengan lebih dari 40 negara dalam waktu satu dekade, menghabiskan hampir \$ 1 triliun uang pemerintah.¹⁵⁶

Stabilitas Xinjiang kemudian merupakan syarat mutlak bagi Cina dalam kaitannya dengan konflik Suriah. Sebagaimana Zenn amati¹⁵⁷ "Cina memiliki kemampuan untuk merespon secara politik dan mungkin militer untuk memerangi ISIS". Dalam sidang tahunan parlemen di Beijing, sekretaris Komite Regional Xinjiang dari Partai Komunis Cina, Zhang Chunxian menyatakan bahwa Xinjiang

¹⁵⁶ Shannon Tiezzi, "China's 'New Silk Road' Vision Revealed" *The Diplomat*
<http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/> (diakses 5 Desember 2015)

¹⁵⁷ pengamat hubungan Timur Tengah - Cina dapat dilihat dalam Linn hal.3

merupakan "daerah inti"¹⁵⁸ dari sabuk Ekonomi Jalur Sutra. Diresmikan pada September 2013 *Silk Road Economic Bealt* adalah pusat dari kebijakan luar negeri Xi Jinping menuju "*China Dream*."

Zhang lebih lanjut menggarisbawahi bahwa "daerah inti" merupakan pusat keuangan, komunikasi, kesehatan, perdagangan dan logistik, budaya dan pendidikan serta kerjasama energi, dengan kata kuncinya adalah "inti (core)". Dalam konsep New Silk Road ini kemudian semakin jelas arti penting wilayah Xinjiang bagi Cina. Dalam istilah Cina, menekankan suatu hal sebagai kepentingan 'inti' berarti Cina akan berani menggunakan kekuatan militer ketika garis merah tersebut dilanggar.¹⁵⁹

Pada IISS Asia Security Summit 2011, Menteri Pertahanan Cina Liang Guanglie menjabarkan kepentingan inti China sebagai berikut:

"Kepentingan utama termasuk segala hal yang berhubungan dengan kedaulatan, stabilitas dan bentuk pemerintahan. Cina sekarang mengikuti sosialisme. Jika ada upaya untuk menolak langkah ini maka akan menyentuh kepentingan inti Cina. Atau, jika ada upaya untuk mendorong setiap daerah dari Cina untuk memisahkan diri, maka hal ini juga menyentuh kepentingan inti Cina terkait dengan tanah, laut atau udara kami. Kemudian, apa pun yang berhubungan dengan ekonomi nasional dan pembangunan sosial Cina juga menyentuh pada kepentingan inti Cina".¹⁶⁰

¹⁵⁸ "Xinjiang to be Core of Silk Road Economic Belt" *Xinhua*
http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/10/c_134055670.htm (diakses 5 Desember 2015)

¹⁵⁹ Christina Lin, "Chinese General : Anti-Chinese Uyghurs are in Syria's Anti Assad Force"
ISPSW Strategy Series : Focus on Defense and International Security, Issue No.353 Mei 2015

¹⁶⁰ Linn, "Chinese General"

III.2.2 Konflik Suriah dan Xinjiang

Melalui veto di DK PBB dalam konflik Suriah, Cina bersama dengan Rusia berusaha untuk menegakkan prinsip utama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Cina hal ini merupakan prinsip dasar dalam diplomasi antar negara pada era modern. Prinsip ini membuat Cina enggan untuk mendukung solusi diplomatik yang melibatkan pihak luar dalam urusan internal negara lain tanpa perjanjian seluruh pihak yang terlibat konflik. Hal ini menunjukkan bahwa Cina sangat waspada terhadap konsep baru dari hukum internasional, yaitu *responsibility to protect*¹⁶¹, yang melegitimasi kedaulatan nasional dan seringkali digunakan untuk mencegah atau mengakhiri bencana kemanusiaan skala besar. Cina menyadari bahaya bahwa preseden ini dapat digunakan untuk melawan mereka khususnya dalam masalah wilayah teritori mereka sendiri seperti di Tibet dan Xinjiang.¹⁶²

Untuk menjamin kontrol fisik atas Tibet, Xinjiang, dan Mongolia, Cina telah berupaya menghambat upaya luar negeri untuk mendukung gerakan separatis di daerah-daerah yang dihuni oleh etnis minoritas. Intervensi eksternal secara eksplisit mensyaratkan ancaman bagi negara melalui pemberdayaan kelompok pembangkang di dalam negara.¹⁶³ Oleh karena itu, pemerintah Cina sangat sensitif terhadap isu-isu domestik, dan telah mengecam tindakan dan pernyataan resmi negara lain yang mendukung kemerdekaan Tibet dan Xinjiang.

¹⁶¹ Melalui Responsibility to Protect (R2P) kedaulatan negara tidak lagi secara eksklusif melindungi negara dari intervensi luar negeri. Tugas untuk mencegah dan menghentikan kekejaman yang terjadi di suatu negara perama memang menjadi tanggung jawab negara, namun masyarakat internasional mempunyai peran yang tidak dapat dihalangi oleh kedaulatan. <http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml>

¹⁶² Peter Ferdinand, "The Positions of Russia and China at the UN Security Council in the Light of Recent Crises" *Briefing Paper European Union*, (2013) 13

¹⁶³Ren 267

Dalam hubungannya dengan konflik Suriah salah satu tujuan Cina dalam melakukan kebijakan luar negeri adalah untuk mempromosikan keamanan dalam negeri Cina sendiri khususnya di daerah Otonomi Uighur Xinjiang, rumah bagi banyak Muslim Turki etnis China. Kerusuhan etnis dan politik Xinjiang di masa lalu telah menarik dukungan kelompok-kelompok Muslim di luar negeri, khususnya di MENA dan Asia Tengah. Beijing khawatir kelompok-kelompok di luar negeri dapat mendorong apa yang disebut sebagai "pemberontakan separatis."¹⁶⁴ Dalam keterlibatan diplomatik dengan negara-negara MENA, terutama dengan CASCF, Cina mengumpulkan dukungan untuk kebijakan menekan kegiatan 'separatis' di Xinjiang. Sebagai contoh, CASCF Communique' 2010 menyatakan bahwa organisasi negara-negara Arab "melawan pasukan ekstrimis agama atau kekuatan etnis separatis yang terlibat dalam kegiatan separatis terorisme atau anti-Cina."¹⁶⁵

Menurut Dr Murphy, "Setelah dimulainya gelombang Musim Semi Arab, perhatian Cina mengenai stabilitas dalam negeri dalam kaitannya dengan Timur Tengah telah bergeser dari isu-isu yang berkaitan dengan Xinjiang menjadi pencegahan penyebaran Arab Spring dari Timur Tengah ke Cina."¹⁶⁶ Mulai tahun 2011, para elit Cina berusaha untuk memastikan kerusuhan tidak terjadi di Cina dengan menekan Arab Spring - dengan menyensor informasi terkait di Internet, dan menekankan melalui media resmi dan setengah resmi bahwa perubahan populer negara-negara MENA menuju sistem demokrasi adalah keliru¹⁶⁷

¹⁶⁴ Linn. 63

¹⁶⁵ Linn 64

¹⁶⁶ Linn 64

¹⁶⁷ Linn 65

Secara khusus dalam konflik Suriah, adanya hubungan antara pihak oposisi Suriah dengan teroris adalah salah satu faktor yang memaksa Cina untuk mengambil kebijakan saat ini di Suriah. Jaringan teroris global Al Qaeda dan ekstremis Islam lainnya mendukung oposisi dan berpartisipasi dalam konflik melawan pemerintah Suriah.¹⁶⁸ Jihadis Asia Tengah lainnya di Suriah semakin menunjukkan aktivitas mereka dengan Al-Qaeda di Iraq, al-Sham, dan Mediterania Timur.¹⁶⁹ Singkatnya, stabilitas politik sebagian besar etnis dan daerah marginal merupakan elemen penting yang menggerakkan kebijakan non-intervensi Cina serta kebijakan luar negeri secara keseluruhan.

III.2.3 Gerakan Terorisme dan Separatis di Cina serta Hubungannya dengan Oposisi Teroris Konflik Suriah

Cina dihadapkan pada serangkaian insiden kekerasan separatis di Xinjiang sejak tahun 2009. Ketika itu kerusuhan terjadi di daerah Ulumuqi, ibu kota wilayah otonomi Xinjiang. Lebih dari 200 penduduk etnis Uighur dan Han tewas. Pemerintah Cina mengklaim Eastern Turkistan Movement (ETT) telah mengorganisir kerusuhan tersebut. ETT telah menjadi target utama dari kegiatan kontra-terorisme Cina, terutama setelah hubungan antara gerakan separatis lokal dan al Qaeda ditemukan pada tahun 2009.¹⁷⁰

Pan Guang seorang spesialis Cina-Timur Tengah dari Akademi Ilmu Sosial Shanghai menyatakan bahwa "pada bulan Juli 2011 ketika terjadi pemboman di Xinjiang, untuk pertama kalinya gerakan separatis Uighur menegakkan bendera

¹⁶⁸ Ren, "Interpreting China's 271

¹⁶⁹ Ren, "Interpreting China's 271

¹⁷⁰ Ren, "Interpreting China's 271

Salafi (hitam dengan tulisan Arab) daripada bendera ETT mereka biasanya (biru dengan bintang dan bulan sabit mirip dengan bendera Turki)".¹⁷¹

Kelompok militan utama anti-Cina selain ETT adalah Turkistan Islamic Party (TIP) yang melakukan beberapa serangan di Xinjiang dan diklaim melakukan pemboman mobil bunuh diri di Lapangan Tiananmen Beijing pada Oktober 2013, kemudian juga melakukan serangan menusuk massa di stasiun kereta api Kunming dan Guangzhou di tahun 2014 dan bom bunuh diri ganda di stasiun kereta api di Urumqi, ibukota Xinjiang. Pada bulan Februari 2014 TIP mengeluarkan video yang berisi "himbauan" untuk pejuang di Suriah dan beberapa bulan kemudian ditampilkan kepada para pejuang di Suriah.

Duta besar Suriah untuk Cina menegaskan bahwa ada lebih dari 30 orang Uyghur yang menerima pelatihan militer di Pakistan dan pergi ke Turki untuk bergabung dengan pasukan perang anti-pemerintah. Pemerintah Cina mengklaim bahwa sejak 2012 militan Uighur dari Xinjiang telah bergabung dengan pemberontak di Suriah melawan rezim Assad. Salah satu militan kembali ke Xinjiang dan berhasil ditangkap ketika merencanakan untuk melakukan serangan kekerasan di Cina.¹⁷² Kementerian Luar Negeri Cina menyoroti dugaan hubungan antara militan dari penduduk Cina Turki dan minoritas Muslim dan Al-Qaeda.¹⁷³ Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina Hua Chunying mengklaim bahwa anggota dari ETT yang kembali dari Suriah terkait dengan kepentingan inti Cina (yaitu kestabilan Xinjiang).¹⁷⁴ Jika rezim Assad digantikan oleh rezim Islamis, ekstremisme akan cepat menyebar ke republik Muslim di Asia Tengah dan

¹⁷¹ Ren, "Interpreting China's 271

¹⁷² Ren, "Interpreting China's

¹⁷³ Kemenlu Cina 2012

¹⁷⁴ Kemenlu Cina, 2013

Xinjiang. Dengan demikian, keprihatinan Cina atas stabilitas di Xinjiang mempengaruhi kebijakan Cina di Suriah.

Pada bulan November 2014 Hubungan Cina-Turki memanas ketika Beijing menuduh Ankara telah mempromosikan "imigrasi ilegal" untuk pengungsi Uighur yang tertangkap di Thailand. Lebih dari 50.000 penduduk Uighur Cina diduga telah melakukan perjalanan melalui Thailand dan Malaysia untuk kemudian masuk ke Suriah setelah tinggal sehari di Turki.¹⁷⁵ Angka 50.000 orang nampak sedikit berlebihan, namun dapat dipastikan bahwa Cina Uighur telah bergabung dengan berbagai pemberontak dan kelompok-kelompok jihad melawan Assad selama empat tahun terakhir, termasuk kelompok Al-Nusra.

Pejabat kontra-teror China juga telah menyatakan keprihatinan bahwa kelompok militan Uighur seperti ETIM dan TIP telah merekrut sekitar 25.000 orang ditambah penduduk diaspora Uighur di Istanbul. Pada bulan Oktober 2012, pejabat pemerintah Cina termasuk Mayor Jenderal Jin Yanan¹⁷⁶ dari People Liberation Army's (PLA) National Defense University, pertama mengungkapkan bahwa militan Cina milik organisasi teroris East Turkistan telah bergabung dengan pemberontak anti pemerintah di Syria. Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei memperingatkan bahwa kelompok-kelompok anti-Cina di Suriah telah "serius membahayakan keamanan nasional Cina" serta mengancam perdamaian dan stabilitas regional. Pejabat kontra-teror memperkirakan ada sekitar 300 pejuang Cina di ISIS, serta militan tambahan dalam faksi pemberontak lainnya seperti Free Syrian Army.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Lin, "Chinese General"

¹⁷⁶ Lin, "Chinese General"

¹⁷⁷ Lin, "Chinese General"

Klaim Cina atas keikutsertaan militan Uighur dalam pasukan pemberontak melawan Assad dikuatkan oleh bukti visual pada bulan Maret dan April 2013, ketika video pertama dari pemberontak Cina muncul. Salah satunya dirilis oleh *Liwa al-Mujahidin al-Ilami* (Batalyon Media Mujahidin), dan menunjukkan pernyataan militan Cina bahwa Muslim dan Arab sekarang akan menyerang "ekonomi China" sebagai balas dendam untuk aksi Cina dan Rusia yang mendukung Assad secara politik, ekonomi dan militer. Video lain dirilis oleh pengguna akun "Al-Nusrah Front"¹⁷⁸ berjudul "Prayer by a Chinese Jihadist in the Land of Epics [The Levant]"

Menurut Jacob Zenn pada Oktober 2014 dalam artikelnya di *China Brief*¹⁷⁹ mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok militan anti-Cina di Suriah mengeluarkan propaganda anti-Cina. Hal ini semakin mendukung pernyataan Jenderal Jin Yanan bahwa "organisasi jihad East Turkistan telah mengambil keuntungan dari perang sipil Suriah untuk memperoleh pengalaman dan meningkatkan profil Xinjiang diantara jihadis dari organisasi lain."

Zenn juga mengamati bahwa "jika pemerintah Suriah berhasil dikalahkan oleh pemberontak, hal ini bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk Uighur dan militan anti-Cina lainnya untuk berlatih dengan kelompok pemberontak yang menang, seperti ISIS, untuk melakukan serangan dari China." Ancaman ini semakin nyata ketika pada Juli 2014 pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi menyerukan jihad dan menyatakan perang terhadap negara-negara yang "merebut hak Muslim" dengan menyebut Cina pertama kali di antara 20 negara. Dalam video tersebut, al-Baghdadi merujuk pada Xinjiang berkali-kali dan

¹⁷⁸ Lin, "Chinese General"

¹⁷⁹ Lin, "Chinese General" 2

meminta Muslim di Cina untuk memohon kesetiaan kepadanya, bahkan mengancam untuk menduduki wilayah Xinjiang yang menjadi bagian dari peta kekhalifahan ISIS.¹⁸⁰ Al Qaeda kemudian mengikuti beberapa bulan kemudian yaitu pada bulan Oktober ketika menyatakan perang terhadap Cina dan menerbitkan majalah berbahasa Inggris Resurgence, dengan bagian yang berjudul "10 Fakta Tentang Turkistan Timur" yang berisi kritikan terhadap kebijakan Cina pada etnis Uighur di Xinjiang.¹⁸¹



¹⁸⁰ Lin, "Chinese General" 2

¹⁸¹ Lin, "Chinese General" 3

BAB IV

Penutup

IV.1 Kesimpulan

Penelitian ini berusaha menggambarkan kepentingan Cina dalam konflik Suriah sehingga ia mengambil kebijakan untuk mendukung penyelesaian konflik secara politik. Penelitian ini didasari pada perubahan sikap Cina yang sebelumnya tidak tertarik untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Sebagai contoh kurangnya peran Cina adalah pada kasus konflik Libya yang merupakan bagian dari gelombang Arab Spring. Dalam kasus Libya tersebut Cina memilih untuk tidak aktif, hal ini khususnya tercermin dalam kebijakannya untuk tidak melakukan veto dalam tiap resolusi DK PBB yang diajukan. Padahal ditinjau dari kepentingan ekonomi, Libya sendiri sedikit lebih berpengaruh ke Cina daripada Suriah. Dalam konflik Suriah kemudian Cina ikut berperan aktif untuk mendukung penyelesaian masalah secara politik. Cina setidaknya telah menggunakan empat dari total sepuluh vetonya hanya untuk kasus Suriah.

Dari seluruh data yang dipaparkan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang telah diajukan di Bab 1, yaitu Cina berkepentingan secara ekonomi dan juga keamanan. Dalam hal kepentingan ekonomi Cina berusaha menjaga kerjasama ekonomi dan kebutuhan potensial energinya dengan negara kawasan MENA. Kemudian dalam hal kepentingan keamanan Cina berusaha untuk memastikan gerakan terorisme, esktrimisme, dan separatisme tidak menyebar ke Cina khususnya di wilayah Xinjiang.

Kebijakan luar negeri Cina di Suriah yang bersifat lunak dan menolak segala bentuk intervensi militer serta berusaha menyelesaikan masalah secara politik dapat dipahami melalui dasar kebijakan luar negeri Cina. Dalam konflik Suriah, Cina konsiste dengan dasar dasar luar negeri yang dibentuk olehnya. Melalui prinsip *Five Principles of Peaceful Coexistence Cina* secara tegas untuk menghormati kedaulatan negara lain, dan tidak mencampuri urusan internal negara. Prinsip ini terus dipegang oleh Cina dalam konflik Suriah. Melalui prinsip ini Cina mendapat keuntungan untuk memastikan stabilitas wilayah MENA yang tentu saja berguna untuk kepentingan ekonomi dan keamanannya. Selain prinsip dasar tersebut Cina juga menjalani kebijakan China Peaceful Rise dimana pertumbuhan ekonomi Cina menuju great power tidak akan berakibat pada peperangan seperti yang terjadi pada pergantian kekuasaan sebelumnya. Hal ini kemudian menjelaskan tindakan Cina di Suriah yang anti terhadap penggunaan kekerasan untuk mendapat keuntungan.

Namun dengan pendekatan teori realisme defensif yang diajukan penulis, kebijakan luar negeri Cina yang cenderung menolak adanya tindakan agresif dan mengutamakan penyelesaian secara politik tersebut bagaimanapun juga didasari oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan Cina sendiri yang pertama adalah untuk memenuhi hubungan ekonomi dan keamanan potensial energinya. Dari data yang diperoleh memang menunjukkan bahwa hubungan ekonomi Cina tidak terpusat pada negara-negara di kawasan MENA, namun jumlah yang diperoleh tetap cukup signifikan bagi ekonomi Cina. Satu hal yang menjadi penggerak penting Cina di kawasan ini adalah kebutuhan akan minyak bumi. Arab Saudi dan Iran menjadi negara pengimpor nomor satu dan dua ke Cina. Cina menjadi

demikian tergantung dengan kedua negara-negara ini. Dalam kaitannya dengan sikap Cina dalam konflik Suriah, Cina berusaha untuk mempertahankan stabilitas kawasan Timur Tengah. Ketika efek domino dari konflik terus berlanjut maka dikhawatirkan akan berpengaruh pada Cina terlebih ketika konflik tersebut berlanjut ke negara yang menjadi mitra baik bagi Cina yaitu Iran.

Kepentingan lain Cina di Suriah adalah memastikan agar gerakan separatisme, esktrimisme, dan terorisme tidak menyebar ke Cina. Dari data yang telah dipaparkan maka terlihat bahwa ada kaitan antara gerakan separatis di Xinjiang dan juga gerakan ISIS yang menjadi salah satu oposisi dalam konflik Suriah. Cina untuk itu berusaha sebisa mungkin agar pemerintahan Suriah tidak dikuasai oleh oposisi dari gerakan jihad ini. Melalui berbagai pernyataannya Cina khawatir jika keberhasilan ISIS nantinya akan menimbulkan gejolak bagi gerakan gerakan separatis, ekstremis, dan teroris lain terlebih di wilayah Xinjiang. Para jihadis ISIS dari Cina juga dikhawatirkan akan kembali lagi ke Cina untuk kemudian membangun gerakan yang sama di teritorial Cina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

"New Scenes at the Ancient Silk Road", (Beijing: New Star Publishers, 1995)

Blaxter et al., *How to Research*, terj. (Jakarta: Indeks, 2006), 251-252.

Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), 5.

Kumar, Anil *New Security Concept of China : An Analysis* Institute of Peace and Conflict Studies, (New Delhi : India,2012)

Buku Online

Tang,Shiping, *A Theory of Security Strategy for Our Time : Defensive Realism* (New York:Palgrave MacMillan 2010), .107
<http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/view/10.1057/9780230106048>

Wang, Jianwei. *China's Peaceful Rise: A Comparative Study* Seoul : The East Asia Institute, (Mei 2009)
http://www.eai.or.kr/data/bbs/eng_report/2009052017544710.pdf

Xue Tong, Yan. *Analysis of China National Interest* .19
http://cns.miis.edu/books/pdfs/china_national_interests.pdf

Dokumen

Draf Resolusi DK PBB S/2011/612 dapat diakses
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/612

Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/77 dapat diakses
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/77

Draf Resolusi DK PBB no. S/2012/538 (19 Juli 2012) dapat diakses
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/538

Notulensi Pertemuan sidang DK PBB tgl 4 Oktober 2011 dapat diakses di
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.6627

Halaman Web

"China and ISIS threat," The Diplomat <http://thediplomat.com/2014/09/china-and-the-isis-threat/> (diakses 12 Desember 2015)

- "China's Peace Plan for Syria," *Voice of America*,
<http://www.voanews.com/content/chinas-peace-plan-for-syria--141724603/181232.html> (diakses 12 Desember 2015)
- "China: Political Dialogue Crucial to Return Normalcy in Syria," Xinhua, (29 April 2012) http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-04/29/c_13851927.htm. (diakses 12 Desember 2015)
- "China's Position On Syria Issue" *Embassy PRC in Botswana*,
<http://bw.chineseembassy.org/eng/xwdt/t1076201.htm> (diakses 10 November 2015)
- "China Presents a Four-Point Proposal for Resolving the Civil War in Syria," *New York Times*, (1 November 2012), http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/middleeast/syria.html?_r=1&. (diakses 12 Desember 2015)
- "Int'l Community Concerns over Syria Situation," *Xinhua*, (30 April 2011)
http://news.xinhuanet.com/english2010/video/2011-04/30/c_13852874.htm (diakses 12 Desember 2015)
- "Principles of China Foreign Policy" *Asia For Educators*,
http://afe.easia.columbia.edu/special/china_1950_forpol_principles.htm
 (diakses 9 November 2015)
- "Referral of Syria to International Criminal Court Fails as Negative Votes Prevent Security Council from Adopting Draft Resolution" UN Press Release,
<http://www.un.org/press/en/2014/sc11407.doc.htm>
- "Russia and China veto draft Security Council resolution on Syria" UN News Centre <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39935>
- "Russia, China block Security Council referral of Syria to International Criminal Court" *UN News Centre*,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47860>
- "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League's Proposed Peace Plan" UN Press Release <http://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm>
- "Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Syria That Would Have Threatened Sanctions, Due to Negative Votes of China, Russian Federation" *UN Press Release*,
- Syria: Ban voices deep regret after Security Council fails to agree on resolution",
UN News Centre,
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41144>

"Syria : The Story of the Conflict" BBC, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> (diakses 12 Desember 2015)

"Syrian opposition chief meets Chinese foreign minister in Beijing," *Reuters*, <http://www.reuters.com/article/2014/04/16/us-china-syria-idUSBREA3F0ZS20140416> (diakses 4 November 2015)

"Syria : The Story of the Conflict" *BBC*, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868> (diakses 2 Oktober 2015).

"What is China's Role in Syria?" *International Business Times* <http://www.ibtimes.com/what-chinas-role-syria-214021> (diakses 12 November 2015)

"Xinjiang to be Core of Silk Road Economic Belt" *Xinhua* http://news.xinhuanet.com/english/2015-03/10/c_134055670.htm (diakses 5 Desember 2015)

Halaman Web Dengan Pengarang

Beech, Hannah "China's View on Syria Crisis: America's "Hidden Motivations" Are Leading It Astray," *Time*, <http://world.time.com/2013/09/13/chinas-view-on-syria-crisis-americas-hidden-motivations-are-leading-it-astray/> (diakses 2 November 2015)

Brennan, Hugo. "China's Syria Connection" *National Interest* <http://nationalinterest.org/commentary/chinas-syria-connection-8859> (diakses 3 November 2015)

Grove, Thomas., Solomon, Erika. "Russia Boosts Arms Sales to Syria Despite World Pressure," *Reuters*, (21 Februari 2012) <http://www.reuters.com/article/2012/02/21/us-syria-russia-arms-idUSTRE81K13420120221> (diakses 10 Desember 2015)

Hille, Kathrin. "China Open Door to Syrian opposition," *Financial Times*, <http://www.ft.com/cms/s/0/20cc6a8c-5318-11e1-950d-00144feabdc0.html> (diakses 12 Desember 2015)

Kāzemi, Abbās Varij., Chen, Xiangming. "China and the Middle East: More Than Oil" *World Financial Review* <http://www.worldfinancialreview.com/?p=3177> (diakses 2 Desember 2015)

Lin, Christina. "Why China Support Assad : Asian Jihad Hits Syria," <http://www.transatlanticacademy.org/node/611> (diakses 2 November 2015).

Jurnal

Chen, James. 'The Emergence of China in the Middle East', *Strategic Forum*, National Defense University, (Desember 2011)

"China's Position Paper on the New Security Concept", *China Report*, (2002) 39(128) 1-5.

Craig;Lilian. "Xinjiang, Central Asia and the Implications for China's Policy in the Islamic World," *China Quarterly*, (Maret 1993,) 111-129.

Evron, Yoram. "Chinese Involvement in the Middle East: The Libyan and Syrian Crises." *Strategic Assessment* 16:3(Oktober 2013) http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan16_3ENG3.pdf_Evron.pdf (diakses 25 September, 2014)

Ferdinand,Peter "The Positions of Russia and China at the UN Security Council in the Light of Recent Crises" *Briefing Paper European Union*, (2013) 13

Jian,Xu. "Rethinking China's Period of Strategic Opportunity" *China Institute of International Studies*, China International Studies (March/April 2014) http://www.ciis.org.cn/english/2014-05/28/content_6942258.htm, (diakses 10 November 2015)

Jing, Feng. "Piping in Clean Energy," *Beijing Review*, (9 Oktober 2003,) 29.

Jing, Feng . "Tarim to Fuel China," *Beijing Review*, (9 October 2003,) 28.

Lin, Christina "Chinese General : Anti-Chinese Uyghurs are in Syria's Anti Assad Force" *ISPSW Strategy Series : Focus on Defense and International Security*, Issue No.353 Mei 2015

Lin, Christina. "China's Strategic Shift Toward the Region of the Four Seas: The Middle Kingdom Arrives in the Middle East." *Middle East Review of International Affairs* 17, no. 1 (2013): 32, http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/163381/ipublicationdocument_singledocument/660d7c24-8bed-44a0-b6cf-a6038ece03e2/en/226_Lin.pdf

Panda, Damodar. " Xinjiang and Central Asia: China's Problems and Policy Implications Damodar" *Indian Journal of Asian Affairs*, 19: 2, (Desember 2006), 29-44

Pember-Finn, Tom. "China and the Middle East: The Emerging Energy Nexus", *China and the Middle East*, (2011) www.stanford.edu/group/sjeaa/journal111/China4.pdf

Ren, Mu. "Interpreting China's (Non-) Intervention Policy to The Syrian Crisis: A Neoclassical Realist Analysis." *International Research Ritsumeikan* 27.1 (2014): 259-282.

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/Vol.27-1/27_1_12_Ren.pdf (diakses 14 Oktober 2014)

Rose, Gideon. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy." *World Politics* (1998): 144-172. <http://www.jstor.org/stable/25054068>

Sisodia, N.S., Khrisnappa,v. "Global Power Shift and Strategic Transition in Asia" *Academic Foundation* (September 1, 2009) 59

Szczudlik-Tatar, Justyna "China's Position During the Crisis in Syria" *The Polish Institute of International Affairs* 76:409, (8 Agustus 2012) [http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151385/ipublicationdocument_singledocument/79fe8431-72d0-49eb-9a29-389a2c3b7034/en/Bulletin+PISM+No+76+\(409\)+August+8+2012.pdf](http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/151385/ipublicationdocument_singledocument/79fe8431-72d0-49eb-9a29-389a2c3b7034/en/Bulletin+PISM+No+76+(409)+August+8+2012.pdf). (diakses 8 November 2014)

Zamaneh, Radio. "China Looking To Increase Oil Imports From Iran", *Eurasian Review*, (1 Januari, 2011) http://www.eurasiareview.com/01012014-china-looking-increaseoil-importsiran/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29.

Paper, Tesis, Disertasi

Finkelstein, David M. "China's New Concept Security", (Paper dipresentasikan pada National Defense University Conference: The Evolving Role of the People's Liberation Army in Chinese Politics, Washington DC 30 Oktober 2005)

Zha Daojiong dan Michal Meidan, "China and the Middle East in a New Energy Landscape"(Research Paper, Asia Programme, Chatham House, The Royal Institute of International Affairs Oktber 2015), hal.2

Zheng, Yongnian dan Keat Tok, Sow "China's 'Peaceful Rise': Concept And Practice" (Paper diskusi China Policy Institute Nottingham : UK November 2005)